



**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH
TANGGA MISKIN (PUM-RTM) DI KELURAHAN BINTORO
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2014**

*The Evaluation Lower Class Empowerment (PUM-RTM) Program in the Bintoro
Village of Patrang Subdistric of Jember Regency 2014*

SKRIPSI

Oleh

**Fajri Maulana
NIM 090910201069**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH
TANGGA MISKIN (PUM-RTM) DI KELURAHAN BINTORO
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2014**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

Fajri Maulana
090910201069

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

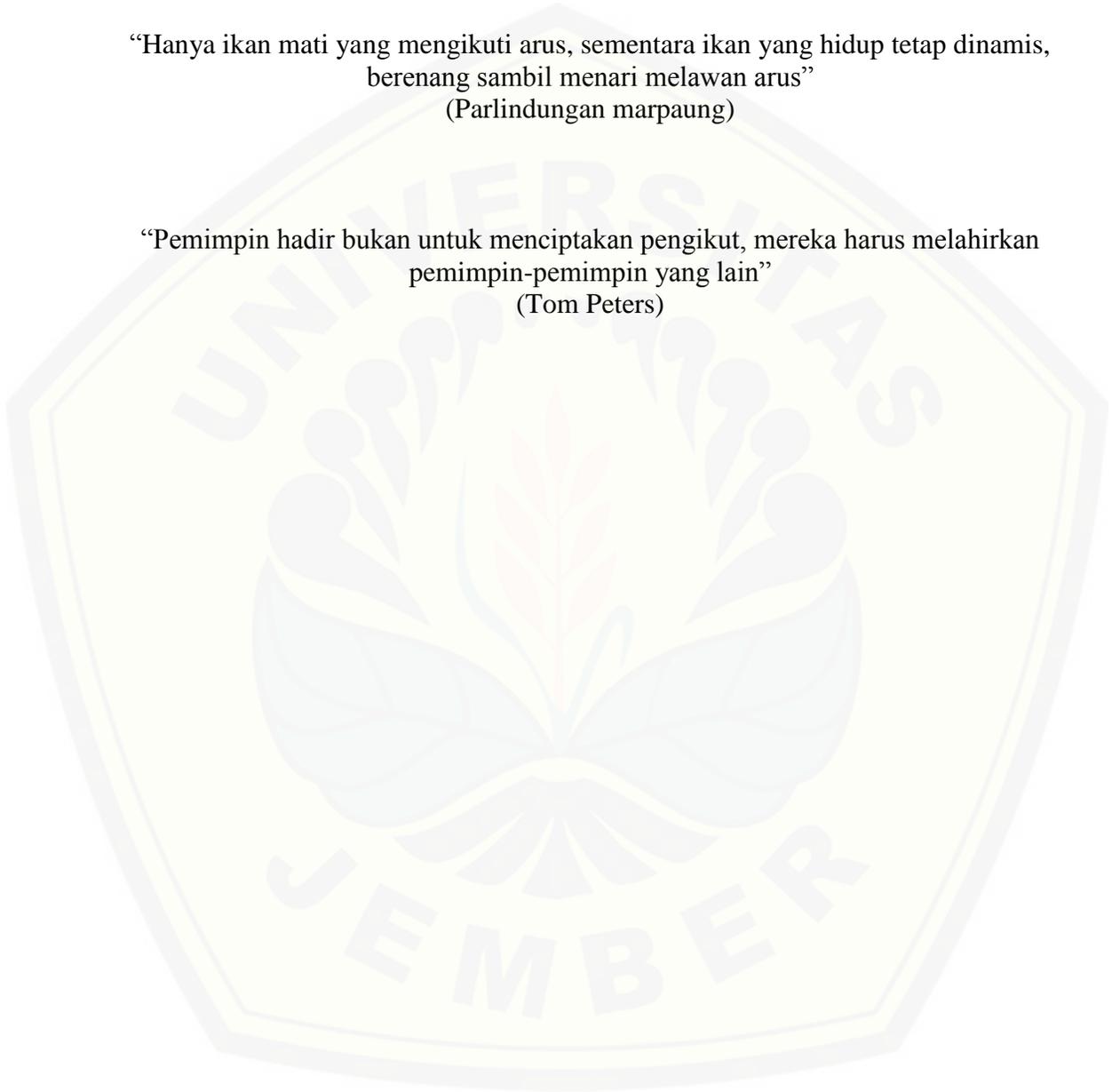
Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Suyanto dan Ibunda Wasi'ah, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi untuk tetap bisa bermanfaat bagi orang lain, selalu mendoakan, selalu menasehati menjadi lebih baik.
2. Semua guru-guru sejak saya mengenal bangku sekolah, mulai TK Dewi Masyitoh Tegal Wangi, MI Mambaul Ulum Tegal Wangi, SMPN 1 Umbulsari, MAN 2 Jember, Universitas Jember serta semua guru di luar bangku sekolah yang telah berbagi ilmu pengetahuan sebagai bekal merangkai kehidupan supaya bermanfaat bagi sesama.
3. Almater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Hanya ikan mati yang mengikuti arus, sementara ikan yang hidup tetap dinamis,
berenang sambil menari melawan arus”
(Parlindungan marpaung)

“Pemimpin hadir bukan untuk menciptakan pengikut, mereka harus melahirkan
pemimpin-pemimpin yang lain”
(Tom Peters)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajri Maulana

NIM : 090910201069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PUM-RTM) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atau The Evaluation Lower Class Empowerment (PUM-RTM) Program in the Bintoro Village of Patrang Subdistric of Jember Regency 2014*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2016

Yang menyatakan

Fajri Maulana

NIM 090910201069

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH
TANGGA MISKIN (PUM-RTM) DI KELURAHAN BINTORO KECAMATAN
PATRANG KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2014**

Oleh

**Fajri Maulana
NIM 090910201069**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr Sutomo M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : M. Hadi Makmur S.Sos. MAP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat (PUM-RTM) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2014” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Jum’at, 25 Februari 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 19580510 198702 2 001

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 19650312 199103 1 003

Anggota Penguji

1. M. Hadi Makmur S.Sos, MAP (.....)
NIP.19741007 200012 1 001
2. Drs. Agus Suharsono, M.Si (.....)
NIP. 19630814 198903 1 023
3. Drs. Anwar, M.Si (.....)
NIP. 19630606 198802 1 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2014; Fajri Maulana, 090910201069; 2015: 91 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program PUM-RTM yang ada di Kelurahan Bintoro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa pemberdayaan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, Dunia

Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun tujuan secara spesifik dari pemberdayaan usaha mikro menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dua usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
3. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif
4. Meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) merupakan inovasi program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Jember. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2005. Inovasi PUM-RTM dirancang secara khusus dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan mengembangkan usaha mikro sebagai alternatif usaha sampingan, berbasis pada penguatan institusi, berorientasi pada keberlanjutan usaha serta menyentuh langsung pada keluarga miskin. Kegiatan PUM-RTM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Aktivitas penguatan modal usaha dilaksanakan setelah penguatan institusi dilakukan secara benar. Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya dua institusi yaitu institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro) dan institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat). Sehingga menjadi penting untuk mengevaluasi program tersebut secara *on going* untuk mengetahui tahapan dalam melaksanakan program ditambah pola pemanfaatan program serta dampak yang ditimbulkan oleh program mengingat program sudah berjalan dalam kurun waktu 5 tahun.

Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa tahapan dari program itu tidak berjalan maksimal. Dari beberapa LKMM yang ada di Kelurahan Bintoro, LKMM Krajan, LKMM Plalangan, LKMM Perbal tidak menjalankan proses penguatan institusi dengan aktif diantaranya masih belum mempunyai struktur kepengurusan yang lengkap, tidak adanya AD/ART, dll. Dalam penguatan modal, ketiga LKMM tersebut hanya mendapatkan dana pada awal program berjalan dan tidak ada dana tabahan. Pada hal pengembangan keterampilan, ketiga LKMM tidak mengadakan pengembangan keterampilan apapun pada anggota.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci yang telah ditentukan, peneliti memperoleh data-data yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Informan yang ditentukan adalah Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah Kabupaten Jember, serta Pengurus LKMM Krajan, Plalangan, Perbal. Informan selanjutnya adalah anggota dari ketiga LKMM tersebut. Selama proses penelitian ternyata dari beberapa informan tersebut sudah mengalami kejenuhan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan hasil evaluasi yaitu Dinas lebih aktif mengontrol baik berupa keuangan ataupun kegiatan yang dilakukan sehingga LKMM bisa lebih sehat dan hidup dalam mengadakan kegiatan. Adanya penambahan modal usaha pada LKMM yang berprestasi. Ukuran berprestasi bukan semata-mata dilihat dari angsuran yang lancar tapi seberapa tepat sasaran program dilakukan. Menutup atau mengambil alih hak LKMM jika ditemukan LKMM yang sudah tidak bisa diperbaiki dalam hal pengelolaan dan penentuan target sasaran. Karena dengan dana yang dikururkan memang untuk masyarakat miskin banyak dinikmati oleh yang bukan orang miskin.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT selalu penulis panjatkan karena dengan rahmat serta hidayah-Nya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2014” ini. Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir dan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial di Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi S.Sos, MM. dan Bapak Drs Moeroe Supranoto M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta selaku dosen wali selama penulis berstatus sebagai mahasiswa.
4. Bapak Dr. Sutomo M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berbagi waktu dan selalu dengan sabar membimbing sembari memotivasi sehingga pembuatan skripsi ini selesai.
5. Bapak M. Hadi Makmur S.Sos. MAP selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan membantu saya dalam memperkuat pemahaman saya terhadap skripsi ini.
6. Bapak Moelyono selaku operator Program Studi Administrasi Negara yang selalu dengan kesabarannya melayani kebutuhan administratif mahasiswa.

7. Bapak Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Mutiara yang paling kemilau, kedua orang tua saya yang tak kenal lelah menanyakan “kapan kamu lulus, Nak?”. Akhirnya saya lulus Pah! Mah! Terima kasih atas dukungan moril dan materil tanpa disadari oleh mereka, telah banyak memberikan pelajaran hidup serta selalu memberikan do’a dan restunya sehingga menjadi kekuatan rohani yang selalu memberikan kekuatan, motivasi dan semangat bagi penulis selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
9. Kakak-kakak tercinta, Wardhatul laily, Ghanif Agung Revianto S.Pd, Zainal Arifin, M.Pd, dan Taufiqur Rohman S.Sosyang selalu memberi dukungan yang bersifat finansial dan motivasi serta keceriaan sehingga skripsi ini selesai.
10. Wanitaku “Amytha Saraswati” seseorang yang senantiasa memberi kebahagiaan yang tak terduga, bisa bertransformasi menjadi teman, kakak, adik, dan pendamping dalam beberapa situasi. Terimakasih atas segala “nyinyir” yang diberikan, karena dengan itu penulis mengerti arti tertib yang sebenarnya. Terima kasih atas suka duka dan menulis cerita panjang dalam hidup di setiap harinya selama proses pembuatan skripsi sampai selesai.
11. M Fachrur Rozy, Lega Nodoro Putro, Andi Irawan, Agung Prahadian K sahabat setia yang menghambat proses kelulusan, sejak awal penulis mulai mengenal kampus yang selalu berbagi duka, keceriaan dan pelajaran hidup, karena kalian penulis mengerti arti lulus yang sebenarnya. Tidak lupa juga Ananda Abdul Aziz “Dul”, Panji Latalatop “Penjol” dan “Masday” Dayu Avivantoro yang memberikan kehangatan persahabatan saat penat menyapa di keseharian penulis.
12. Sahabat-sahabati warga pergerakan PMII Rayon FISIP Universitas Jember, Mas Hermanto (Cacak), Mas Ulung, Mas zen, Mas kus, Mas Pi’i dan Mas-mas yang lain yang selalu menjadi kakak yang sabar memberi pemahaman selama penulis berproses. Sahabat satu angkatan, Virgie, Alrisa, Dayyar, Rafi dan sahabat-sahabat yang lain yang telah memberi rasa “*satu angkatan sak duluran sak lawase*” serta seluruh warga pergerakan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu

persatu yang telah memberikan kesempatan berproses sehingga memberikan pengalaman dan ilmu yang yang tidak bisa diperoleh di bangku kuliah.

13. Teman-teman Administrasi Negara angkatan 2009 yang menjadi teman dalam menimba ilmu dan berpetualang, penulis pertanyakan kesetiakawanan kalian. Kenapa kalian meninggalkan penulis di belantara kampus sendirian, Semoga kalian dihindarkan dari status Pengangguran.
14. Buat sahabat berbagi keluh kesah, imam, Ferio, deden, Royin, Aida, Nandut, ipeeh, wiek, Terima kasih telah memberikan ruang bertukar pikiran meskipun terkadang banyak “nyinyir” dan mengurus kegiatan orang.
15. Adik-adikku Rayhan, Angga, Candra, Fajri cilik, Maria, April, Aisyah dan semua keluarga besar PMII Rayon Fisip teruslah menciptakan ruang manfaat bagi sesama dan terkecuali yang sudah lulus lampaulah kakakmu dengan lulus cepat.
16. Kakak’e Misnadin dan Yuk Surya, terimakasih atas kasih sayang kalian.
17. HMJ Himaista, Organisasi intra kampus yang menjadi ruang berproses bagi penulis dan mengerti bahwa seorang pemimpin yang baik harus mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru serta dalam belajar berorganisasi dan berberbagi pemikiran layaknya seorang organisatoris.
18. Bapak Agus Edhi Santoso selaku Kabid UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember, Ketua LKMM Krajan, Palangan, dan Perbalserta masyarakat desa yang tidak bisa di sebutkan satu-satu, yang banyak membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai penulis tentunya berharap semoga skripsi ini menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran selalu penulis terima demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 11 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kemiskinan	14
2.2 Pembangunan	18
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	24
2.4 Evaluasi Kebijakan	28
2.4.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan	30
2.4.2 Pendekatan terhadap Evaluasi Kebijakan	30
2.4.3 Tipe Evaluasi Program	31
2.4.4 Jenis Evaluasi Program	33

2.5 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM)	34
2.6 Kerangka Berfikir	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian	42
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.4 Data dan Sumber Data	43
3.5 Penentuan Informan Penelitian	44
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data	45
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	48
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	54
4.1.1 Peta, Letak Geografis, dan Keadaan Kelurahan Bintoro ..	54
4.1.2 Keadaan Penduduk	55
4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi	55
4.2 Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) .	57
4.3 Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang	60
4.4 Evaluasi Penguatan Institusi LKMM di Kelurahan Bintoro...	64
4.5 Evaluasi Penguatan Modal LKMM	72
4.6 Evaluasi Pengembangan Keterampilan kelompok dan anggota LKMM	76
4.7 Evaluasi Pola Pemanfaatan Program	80
4.7.1 LKMM Krajan	80
4.7.2 LKMM Plalangan	84
4.7.3 LKMM Perbal	86

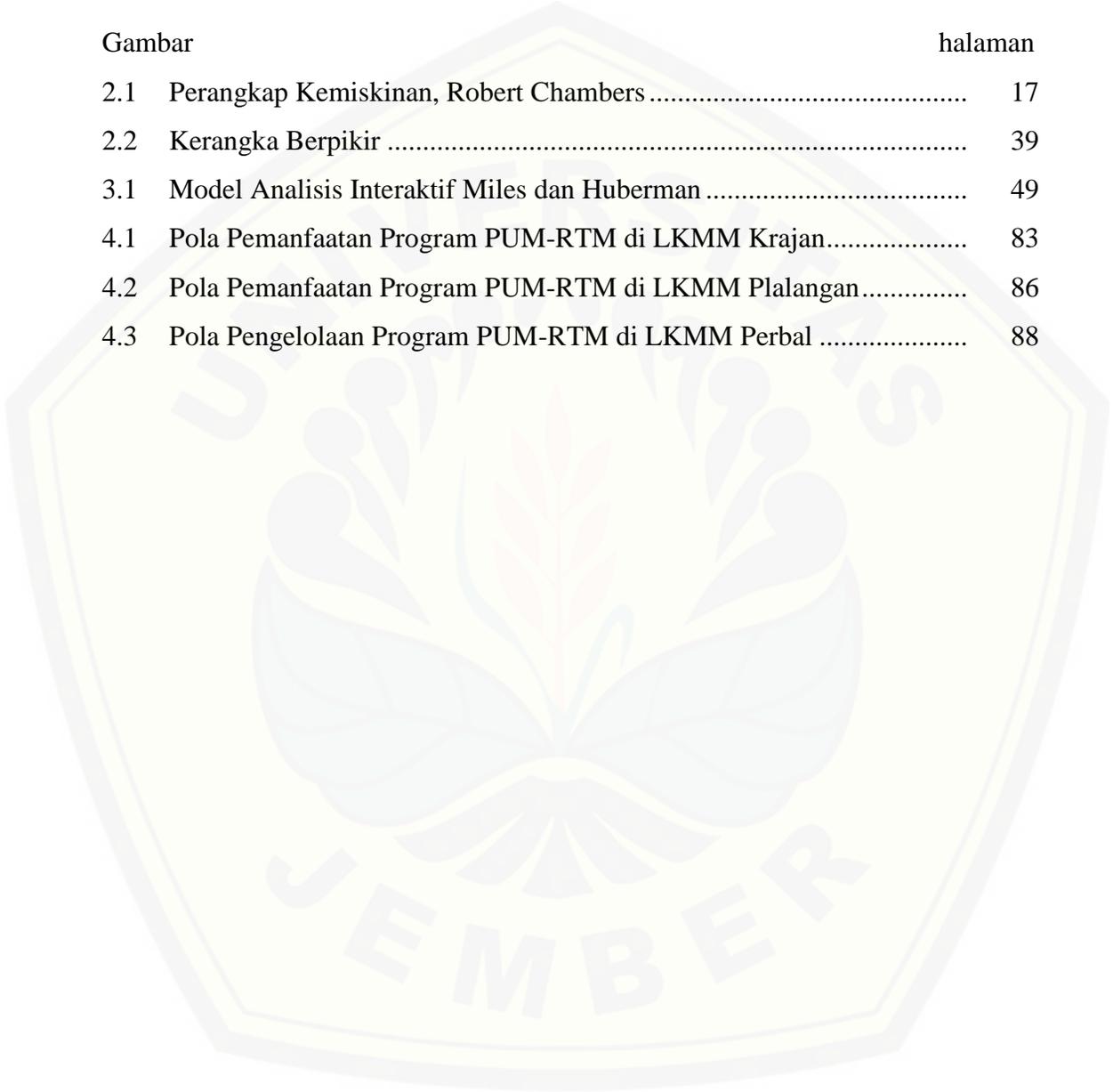
4.8 Evaluasi Dampak Program PUM-RTM terhadap	
Anggota LKMM di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang..	89
BAB 5. PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN A. PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN B. DOKUMENTASI	
LAMPIRAN C. PERATURAN-PERATURAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	2
1.2 Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013.	4
1.3 Jumlah Penduduk miskin (000) se-Karisedenan Besuki Tahun 2010-2013	5
1.4 Jumlah Usaha Mikro Kecil Non Pertanian Kabupaten Jember Menurut Golongan Kegiatan Ekonomi Tahun 2012	6
1.5 Jumlah LKMM di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014	8
1.6 Jumlah LKMM Kecamatan se-Kabupaten Jember Tahun 2014.....	8
3.1 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	51
4.1 Luas Wilayah Kelurahan Bintoro	54
4.2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	55
4.3 Struktur Mata Pencaharian Masyarakat.....	56
4.4 Kesejahteraan Keluarga	56
4.6 Alamat LKMM dan Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan Bintoro.....	60
4.7 Alamat LKMM di Kelurahan Bintoro	61
4.8 Jumlah LKMM di Kelurahan Bintoro	64
4.10 Penguatan Institusi LKMM di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang..	71
4.11 Pengembangan Keterampilan LKMM di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang.....	75
4.12 Penguatan Modal LKMM di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang.....	79
4.17 Pola Pemanfaatan Pogram di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Perangkat Kemiskinan, Robert Chambers	17
2.2 Kerangka Berpikir	39
3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman	49
4.1 Pola Pemanfaatan Program PUM-RTM di LKMM Krajan.....	83
4.2 Pola Pemanfaatan Program PUM-RTM di LKMM Plalangan.....	86
4.3 Pola Pengelolaan Program PUM-RTM di LKMM Perbal	88



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang masih terus dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan (Mubyarto dalam Syafi'i, 2010:24) adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan merupakan fenomena yang senantiasa perlu terus diminimalkan. Sehingga dibutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang konsisten dan berkesinambungan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk memberikan serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warganya dalam memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah tercantum pula di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Sehingga melalui intervensi dari pemerintah tersebut diharapkan dapat tercapai negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kemiskinan tercermin dari belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah hak atas pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, tanah, sumber daya alam, air bersih, dan sanitasi, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan proses pembangunan. Sedangkan dampak dari kemiskinan yaitu jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, dan tidak adanya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kutuhan sandang, pangan dan

papan secara terbatas. Hal ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan kronis dalam proses pembangunan. Adapun data jumlah penduduk miskin beserta persentase penduduk miskin di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2009-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2009	11,910,5	20,619,4	32,530,0	10,72	17,35	14,52
2010	11,097	19,925,6	31,123,4	9,87	16,56	13,33
2011	10,647,2	18,485,2	29,132,4	8,78	15,12	11,96
2012	10,507,8	18,086,9	28,594,60	8,60	14,70	11,66
2013	10,634,4	17,919,4	28,553,9	8,52	14,42	11,47
2014	10,356,6	17,371,9	27,727,7	8,16	13,76	10,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2014 (diolah)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin menurun dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mencapai 1,991 juta orang (1,37 persen). Jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011, 2012 dan 2013 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,57 juta orang. Hasil di atas seharusnya bukanlah hal yang harus dibanggakan, tetapi harus disikapi dengan bijak.

Penyebab masalah kemiskinan sangatlah luas tidak terpatok pada salah satu definisi saja. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi masalah kemiskinan. Beberapa faktor tersebut adalah.

1. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumberdaya dan/ atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah.
2. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Singkatnya, kemiskinan struktural bisa dilihat dari maraknya penyelewengan

anggaran negara untuk kepentingan pribadi melalui perilaku korupsi.

(Soetrisno, 2001:21)

Dari kedua faktor tersebut dapat kita lihat bahwa sangat kompleks penyebab permasalahan kemiskinan, karena tidak hanya bersumber dari aspek ekonomi semata tetapi juga pada aspek sosial, politik, dan budaya. Beban kemiskinan ini utamanya berimbas pada kaum perempuan (khususnya ibu) dan anak-anak, karena disebabkan kekurangan dalam pemenuhan asupan gizi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan (Nainggolan, 2012:1).

Penanggulangan kemiskinan merupakan isu sentral bagi pembangunan di Indonesia, serta lebih meningkatkan dan melakukan dukungan kebijakan-kebijakan dan program kongkrit yang berpihak pada kaum miskin, sehingga dapat menekan lebih besar angka kemiskinan di Indonesia. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa upaya memutus mata rantai kemiskinan, dan diantaranya program kemiskinan selama ini masih didominasi oleh kebijakan dan program pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat dari program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat, baik berupa BLT, Raskin, Jamkesmas, PKH, PNPM Mandiri, Pedesaan, Perkotaan, Pisew, PUAP, KUR dan lain-lain. (Safi'i, 2010:10).

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memiliki jumlah yang cukup besar di bandingkan dengan Usaha Besar (UB) dalam mengisi perekonomian negara ini. Hal tersebut terlihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2012		Tahun 2013	
			UMKM	UB	UMKM	UB
1	Unit Usaha	Unit	56.539.560	4.968	57.900.787	5.066
2	Tenaga Kerja	Orang	107.657.509	3.150.645	114.144.082	3.537.162
3	PDB Atas dasar harga Berlaku	Milyar (Rp)	4.869.568	3.372.296	5.440.008	3.574.943
4	PDB Atas dasar harga Konstan 2000	Milyar (Rp)	1.451.460	1.073.660	1.536.919	1.133.396
5	Total Ekspor Non Migas	Milyar (Rp)	166.627	1.018.765	182.113	979.215
6	Inversati atas dasar harga berlaku	Milyar (Rp)	1.250.801	1.033.072	1.655.234	954.545
7	Inversati atas dasar harga Konstan 2000	Milyar (Rp)	300.176	283.251	341.342	266.538

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2013 (diolah)

Dalam upaya menciptakan kebijakan pengentasan kemiskinan, hendaknya masyarakat miskin bukan hanya dijadikan sebagai obyek bagi kebijakan. Perlu adanya perubahan desain kebijakan pengentasan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat miskin sebagai subyek atau aktor produktif dalam kebijakan. Muhammad Yunus ekonom asal Bangladesh yang mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh institusi dan kebijakan yang mengitarinya adalah benar adanya. Fakta menunjukkan bahwa institusi-institusi yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada keluarga miskin, terutama bagi para pelaku pengusaha mikro. Bank Dunia mendeterminasikan pengusaha mikro termasuk dalam kategori *survival level activities*, artinya antara kemiskinan dengan pengusaha mikro diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (dalam <http://umum.kompasiana.com/2009/03/12/bank-gakin-4167.html>, diakses tanggal 20 desember 2014) Jika hal ini kita terjemahkan lebih lanjut maka upaya pengentasan

kemiskinan tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan pengusaha mikro. Tentu saja pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan yang berkelanjutan dan bukan pemberdayaan yang dapat membunuh kemandirian.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan penduduk miskin yang relatif besar. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember dan kabupaten-kabupaten sekitarnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin (000) se-Karesidenan Besuki Tahun 2010-2013

Tahun	Jember	Bondowoso	Situbondo	Banyuwangi
2010	311,8	131,9	105,2	175,1
2011	292,1	123,6	98,6	164,0
2012	227,0	117,2	93,5	155,5
2013	280,0	118,5	94,5	157,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013 (diolah)

Berdasarkan data di atas dalam empat tahun terakhir Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya yang berada di Karesidenan Besuki. Pada tahun 2010 Kabupaten Jember memiliki penduduk miskin sejumlah 311,8 ribu, diikuti dengan kenaikan 292,1 ribu pada tahun 2011, dan 227,0 ribu pada tahun 2012, serta 280,0 ribu pada tahun 2013. Diikuti kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. Kabupaten Jember merupakan wilayah yang memiliki pengusaha mikro dan biasanya mereka dipusingkan dengan urusan mengakses permodalan untuk usahanya. Rata-rata mereka sulit memperoleh permodalan dari lembaga keuangan karena permasalahan izin dan kelayakan usaha mereka. Berikut merupakan data jumlah usaha mikro kecil non pertanian Kabupaten Jember menurut golongan kegiatan ekonomi tahun 2012 yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Jember terdapat usaha mikro kecil non pertanian yang jumlahnya cukup banyak.

Tabel 1.4 Jumlah Usaha Mikro Kecil Non Pertanian Kabupaten Jember Menurut Golongan Kegiatan Ekonomi Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah	No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kencong	6.405	17	Sumberbaru	4.872
2	Gumukmas	5.149	18	Tanggul	5.523
3	Puger	11.124	19	Bangsalsari	6.418
4	Wuluhan	8.498	20	Panti	2.060
5	Ambulu	9.757	21	Sukorambi	1.861
6	Tempurejo	3.705	22	Arjasa	2.782
7	Silo	6.451	23	Pakusari	3.536
8	Mayang	4.940	24	Kalisat	6.130
9	Mumbulsari	3.653	25	Ledokombo	3.124
10	Jenggawah	6.786	26	Sumberjambe	3.880
11	Ajung	5.293	27	Sukowono	4.443
12	Rambipuji	7.262	28	Jelbuk	1.410
13	Balung	7.304	29	Kaliwates	17.950
14	Umbulsari	5.597	30	Sumbersari	7.884
15	Semoro	2.980	31	Patrang	7.884
16	Jombang	3.363	Total		181.147

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013 (diolah)

Merespon kondisi dan ketidak berdayaan masyarakat miskin dari golongan pengusaha mikro tersebut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember Sejak tahun 2005 telah mengembangkan sebuah inovasi yang diberi nama program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM). Program ini dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember dan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dengan strategi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Menurut Mirfano selaku kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember bahwa PUM-RTM dirancang secara khusus dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga, penguatan institusi serta menyentuh langsung pada keluarga miskin (dalam <http://umum.kompasiana.com/2009/03/12/bank-gakin-4167.html>, diakses tanggal 20 desember 2014).

Kegiatan PUM-RTM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Aktivitas penguatan modal usaha dilaksanakan setelah penguatan institusi dilakukan secara benar. Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya dua institusi yaitu institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro) dan institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat). LKMM dikenal dengan istilah Bank Gakin oleh para anggotanya. Tujuan dari program ini adalah :

1. Meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM)
2. Menyediakan sumber permodalan untuk pengembangan usaha mikro
3. Mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi
4. Memfasilitasi terbentuknya institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro) serta terbentuknya institusi sosial (Pokmas) (dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan LKMM)

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Gakin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sangat pesat bahkan berhasil meraih MDGs Award dan menjadi *role model* bagi bank-bank gakin di daerah lain di Indonesia (Handayani, 2010: 15). Sejalan dengan pernyataan Handayani di atas, pada tahun 2008 dan 2009 Jember meraih Otonomi Award dari *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi* (JPIP) dengan kategori kesinambungan inovasi ekonomi mengungguli kabupaten Bondowoso dan Blitar (dalam <http://www.jpip.or.id/artikelview-345-terilhami-grameen-bukti-solidaitas-duafa.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2014) Bank Gakin di Jember menggunakan prinsip tanggung renteng di antara para anggotanya. Kelompok usaha yang terdiri atas 5-10 orang dapat mengajukan kredit usaha tanpa agunan antara Rp 50.000 hingga Rp 1 juta. Masyarakat yang mengajukan kredit tidak perlu menyerahkan proposal usaha, apalagi melalui survei yang berbelit. Proposal bisa diajukan secara lisan. Dana kredit bisa langsung cair setelah diadakan *survei* sekilas

terhadap usahayang dijalankan. Dengan kucuran kredit berjangka waktu 10 minggu yang diangsur setiap minggu dengan bunga 0,5 persen, terobosan ini diharapkan dapat membantu kelompok usaha kecil dan menengah. Anggota satu Bank Gakin maksimal 200 orang warga miskin. Jika lebih dari 200 orang, bank akan mengalami kesulitan dari sisi pengelolaan. Berikut merupakan perkembangan jumlah LKMM di jember lima tahun terakhir :

Tabel 1.5 Jumlah LKMM di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah LKMM
1	2010	180
2	2011	217
3	2012	248
4	2013	312
5	2014	433

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM (diolah)

Dari tabel di atas menyebutkan bahwa perkembangan jumlah LKMM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebanyak 180 lembaga, diikuti 217 lembaga pada tahun 2011, dan ditahun 2012 sebanyak 248, serta melonjak jauh di tahun 2013 yaitu 312 lembaga. Tahun 2014 LKMM mencapai 433 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupten Jember. Kecamatan Patrang merupakan kecamatan terbanyak dan Kelurahan Bintoro merupakan Kelurahan yang pertama kali menjalankan program tersebut. Berikut data LKMM di lima kecamatan terbanyak di Kabupaten Jember.

Tabel. 1.6 Jumlah LKMM Kecamatan se-Kabupaten Jember Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah LKMM
1	Kaliwates	29
2	Patrang	33
3	Sumbersari	30
4	Bangsalsari	19
5	Jelbuk	21

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM (diolah)

Dari tabel di atas, Kecamatan Patrang merupakan kecamatan dengan jumlah LKMM terbanyak yaitu 33 lembaga dibandingkan dengan kecamatan lain. Selain itu

kelurahan Bintoro yang terletak di Kecamatan Patrang juga merupakan kelurahan yang pertama kali dijalankan PUM-RTM yaitu dusun Mojan dan Semenggu pada oktober 2005. Menariknya, dua dusun itu dipilih karena mendapat info dari kalangan perbankan bahwa keduanya termasuk *blacklist area*. Nasabah dimana dari dusun tersebut seret dalam pelunasan kredit. Namun, DINKOP memandang sisi positifnya yaitu masyarakat di area itu, terutama perempuan, sudah punya semangat usaha mandiri dengan menjadi pembuat bakso, pedagang jamu keliling, pemilik toko kelontong, perajin kerupuk, penjual sayur (*melijo*), penjual buah, bahkan pembuat arang (dalam <http://www.jpip.or.id/artikelview-345-terilhami-grameen-bukti-solidaitas-duafa.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2014).

Gambaran keberhasilan LKMM secara makro memang telah terbukti. Handayani juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa LKMM dikelola oleh keluarga miskin dan pengurunya 90% perempuan. Sebanyak 46% lulusan sekolah dasar dan 5% tidak melewatkan pendidikan formal. Walaupun demikian pada tahun 2009 tercatat omzet mencapai Rp 14 miliar dengan aset Rp 2,1 miliar. Pertumbuhan omzet Selama tiga tahun terakhir rata rata 260% (Handayani,2010). Namun fakta dilapangan ditemukan oleh peneliti menjadi berbeda dan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mendalami pelaksanaan program PUM-RTM. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Modal LKMM, telah disebutkan bahwa sasaran pada program ini adalah wanita dan mempunyai usaha serta proses peminjamannya berbentuk kelompok. Tetapi pada pelaksanaannya tidak demikian. Hasil wawancara dengan Ibu Farid selaku pengurus LKMM Plalangan Kelurahan Bintoro kecamatan Patrang pada tanggal 31 Februari 2014 pukul 15.21 WIB sebagai berikut.

“yang pinjam uang itu tidak berkelompok *mas*, tapi perorangan dan saya *buat* laporannya berkelompok karena dari dinas diwajibkan begitu. Kalau di desa dibuat berkelompok susah *mas* ada tetangga yang *gak* cocok satu dengan yang lain akhirnya tukaran *mas*, laki laki juga ada yang minjam *mas yaa* yang penting mengembalikannya tepat waktu dan lunas dari pada macet *mas*”

Hal ini menarik mengingat tujuan awal dari kebijakan tersebut adalah untuk ibu rumah tangga yang mempunyai usaha guna menambah pemasukan perekonomian keluarga, ini jelas menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Sebagai sebuah kebijakan, Program PUM-RTM yang dilakukan secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi kebijakan. Anderson menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi terhadap program PUM-RTM diharapkan mampu menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari program tersebut, sehingga nantinya dapat dirumuskan bagaimana upaya peningkatan dan perbaikan dalam PUM-RTM.

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji evaluasi program PUM-RTM pada Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang dengan menggunakan kajian *on going evaluation* berfokus pada tahapan pelaksanaan program, pemanfaatan program, dan dampak program. Sehingga penulis mengambil judul “Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Usman dan Akbar (2005:16) masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Namun menurut Sugiyono (2001:35), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Dengan kata lain, definisi masalah penelitian menurut Kountur (2003:35) yaitu suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan

suatu variable pada suatu fenomena. Hal-hal mengenai rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Masalah hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya
2. Rumusan itu hendaklah padat dan jelas
3. Rumusan itu hendaklah memberi petunjuk tentang mungkinya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu (Suryabrata, 2008:13).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan pengertian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2014?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Begitu pula dengan penelitian, yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara sistematis. Tujuan penelitian merupakan gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proses penelitian. Dengan adanya tujuan pula maka penelitian akan terarahkan ke mana proses penelitian akan dibawa. Tanpa adanya tujuan yang jelas, penelitian akan menjadi tidak terfokus pada topik yang akan dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil Evaluasi terhadap program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang

telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori yang diterima di bangku kuliah, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi administrator publik dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Sehingga pelaksanaan program yang dibuat dapat berjalan secara optimal, efektif dan tepat sasaran.

3. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan ilmu Administrasi Negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait konsep evaluasi kebijakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2011:23), yaitu:

“sebagaimana stereotip dalam penelitian kualitatif, terkadang ketika suatu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti cenderung dipengaruhi oleh stereotip teoritis kuantitatif dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal, pada prinsipnya, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dengan demikian teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.”

Sebuah penelitian ilmiah, penulis harus mengikuti landasan pemikiran untuk memudahkan perumusan masalah dan merupakan suatu keharusan bahwa di dalam suatu penelitian terdapat penyajian tentang pandangan teoritis yang mendasari pemikiran peneliti. Untuk menjawab suatu permasalahan maka harus didefinisikan terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan alur berfikir yang rasional maupun empiris. Pengertian teori menurut Singarimbun dan Efendi (1989:37), ”Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk definisi dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”

Konsep dalam suatu penelitian mempunyai maksud dan fungsi sebagai penyederhanaan sekaligus memberikan landasan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Lebih lanjut definisi konsep menurut Singarimbun dan Efendi (2006:33) “Menyatakan konsep yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan melalui konsep

diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*event*) yang berkaitan satu dengan yang lainnya.”

Dengan demikian, tujuan dari konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti penelitian, Maka beberapa konsepsi dasar yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Kemiskinan;
2. Pembangunan;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Evaluasi kebijakan;
5. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM);

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan menurut Leviatan (dalam Soetrisno, 2001:19) adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Senada dengan pendapat di atas Schiller (dalam Soetrisno, 2001:19) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Pada dasarnya konsep kemiskinan senantiasa dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan.

Santosa (2005) menjelaskan kemiskinan secara definitif dengan membaginya menjadi dua konsep kemiskinan, yaitu:

1. Konsep kemiskinan mutlak (absolut), yang berarti Bila tingkat pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Sehingga diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum yang memungkinkan orang atau keluarga tersebut memperoleh kebutuhan dasarnya. Dengan perkataan lain kemiskinan dapat diukur dengan memperbandingkan

tingkat pendapatan orang atau keluarga tersebut dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum.

2. Konsep kemiskinan relatif, yang berarti walaupun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan kebudayaan sekitarnya daripada lingkungan orang atau keluarga yang bersangkutan.

Pendekatan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin yaitu dengan ukuran pendapatan perkapita dibawah rata-rata garis kemiskinan. Standar kebutuhan minimum yang ditentukan BPS yaitu rata-rata pendapatan dengan skala beras seberat 360 kg beras per tahun, angka ini berdasarkan asumsi kebutuhan kalori minimum 2.100 kalori per hari per kapita (Kusnaedi, 1995:84).BPS menggunakan 14 (empat belas) indikator sebagai kriteria dalam penentuan jumlah RTM sebagai target penerima program penanggulangan kemiskinan. Kriteria yang digunakan sebagai indikator adalah sebagai berikut:

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;

12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. (Syafi'i, 2014:11)

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan selain faktor ekonomi, baik yang bersifat relatif maupun yang berkembang. Menurut Kusnaedi(1995:87-88) membagi faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan menjadi dua faktor yaitu faktor relatif dan faktor berkembang. Berikut penjelasannya:

1. Faktor relatif

- a. Letak geografis

Letak geografis dapat menyebabkan kemiskinan apabila letaknya terisolir dari pusat-pusat kegiatan yang menyebabkan tertutupnya informasi dan inovasi yang berkembang. Keterisoliran ini berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang menghubungkan dengan pusat-pusat aktifitas

- b. Daya dukung alam

Daya dukung alam (kesuburan tanah, iklim, dan kondisi air) yang relatif rendah sangat sulit untuk mendukung digunakan untuk mengembangkan potensi pada sektor tertentu seperti sektor pertanian, sementara masyarakat masih bergantung pada sektor tersebut walaupun dalam kondisi yang kurang menguntungkan.

2. Faktor berkembang

- a. Sosial budaya

Keterikatan terhadap pola-pola tradisional dari ikatan adat yang kuat seringkali menghambat dalam pembaharuan yang lebih maju sehingga tertinggal terhadap perkembangan teknologi;

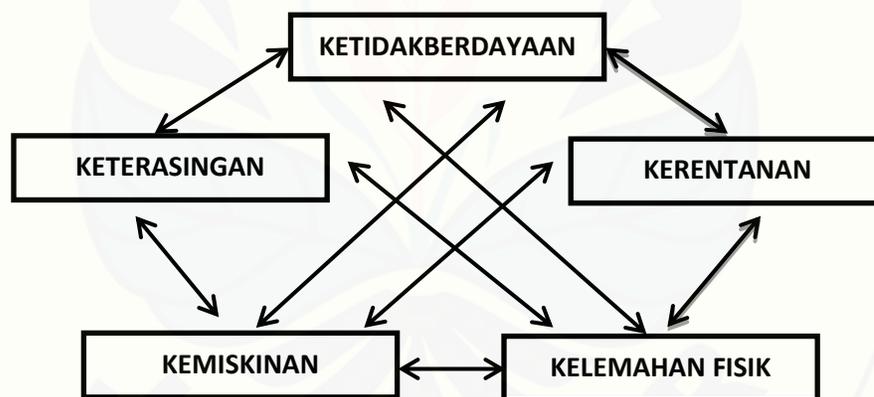
b. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat

Faktor ini berkaitan dengan faktor di atas sehingga berimplikasi pada rendahnya pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit untuk maju;

c. Kebijakan penguasa

Faktor ini menyangkut kecurangan atau ketidakadilan penguasa sehingga menimbulkan ketimpangan, selain itu dapat pula diakibatkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada perlindungan terhadap rakyat lemah.

Chambers (dalam Soetrisno, 2001:25) berasumsi bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkat kemiskinan. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan, satu dan lainnya terjalin dalam suatu kerangka yang disebutnya *deprivation trap* sebagaimana dijelaskan dalam bagan dibawah ini.



Gambar 2.1 Perangkat Kemiskinan, Robert Chambers (Sumber: Soetrisno, 2001:26)

Perangkat kemiskinan yang terdiri dari lima unsur di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam suatu jalinan interaksi timbal-balik, dari kelima unsur tersebut kerentanan dan ketidakberdayaan mendapatkan perhatian utama. Karena menurut Chambers (dalam Soetrisno, 2001:27) kerentanan adalah suatu kondisi dimana keluarga miskin tidak memiliki kesiapan mental maupun material sehingga menyebabkan perilaku keluarga miskin untuk menjual harta benda serta aset

mereka. Sedangkan ketidakberdayaan tercermin dalam perilaku penguasa yang melakukan kecurangan sehingga berimplikasi pada masyarakat miskin misalnya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin pihak penguasa mengambil keuntungan (Soetrisno, 2001:27). Hal ini mengakibatkan masyarakat miskin semakin tidak berdaya dan bantuannya menjadi bias, karena bantuan yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat miskin jatuh kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, perangkat kemiskinan tidak dimaknai jauh dari lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*), sebuah teori yang dicetuskan oleh Ragnar Nurkse. Sebagaimana dalam lingkaran setan kemiskinan yang menggunakan produktivitas sebagai kunci untuk memutuskan rantai tersebut, maka dalam perangkat kemiskinan ini, ketidakberdayaan dan kerentanan menjadi kunci untuk keluar dari perangkat. Tentunya dapat kita lihat dari berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun secara substansi belum menyentuh pada akar persoalan kemiskinan.

2.2 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1983:2-3). Adanya kebijakan pembanguana ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan kesehatan. Karena dalam urusan kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar bagi manusia, dengan kondisi masyarakat yang sehat diharapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pemerataan antar golongan penduduk.

Pembangunan yang secara jelas merupakan bagian dari proses perubahan menunjukkan bahwa pembangunan bersifat dinamis. Sifatnya yang dinamis

mengakibatkan dalam perkembangan pembangunan mengalami pergeseran paradigma, yang membawa pada konsep, strategi, dan proses itu sendiri. Paradigma pembangunan mengalami pergeseran dari pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma, kesejahteraan, paradigma, neo-ekonomi, paradigma ketergantungan sampai paradigma *humanizing* (Tjokrowinoto 1996).

Berkenaan dengan pergeseran pembangunan, Moeljarto (1995) mengidentifikasi tiga strategi pembangunan yang berfungsi sebagai kerangka perencanaan di masing-masing negara. Ketiga strategi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan yang berdimensi pada pertumbuhan

Paradigma ini memandang tujuan pembangunan pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yakni menyangkut kapasitas ekonomi. Adapun yang dijadikan indikator dalam pertumbuhan ekonomi adalah, kenaikan pendapatan nasional atau pendapatan perkapita secara nyata secara kumulatif. Dalam mencapai angka pertumbuhan yang tinggi maka pemilihan struktur produksi dan kesempatan kerja yang terencana guna meningkatkan porsi industri jasa dan manufaktur, serta mengurangi porsi sektor pertanian secara berimbang, barangkali tidak dapat dihindari. Karena itu proses pembangunan terpusat pada produksi, sedangkan penghapusan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menduduki urutan kepentingan kedua terutama dicapai melalui "*trickle down effect*".

Selain dengan cara tersebut paradigma ini juga mengasumsikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tergantung pada tingkat investasi tertentu. Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah pada paradigma ini adalah menciptakan suatu lingkungan yang akan memungkinkan suatu negara meraih investasi, karena itu peranan pemerintah bersifat *entrepreneurial*. Indikator dan upaya tersebut belum dapat memuaskan para ahli dan negarawan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat derajat hidup pada sebagian besar masyarakat terbawah. Sehingga

muncullah sebuah kritik akibat dari ketidakpuasan terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi.

Tjokrowinoto (1996) menyampaikan bahwa keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah membawa akibat yang negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (*at the expense*) deteriorasi ekologis, penyusutan sumber dan timbulnya kesenjangan sosial serta dependensi. Korten (1998) juga menambahkan bahwa dorongan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi tingginya seringkali mengakibatkan terabaikannya upaya pembinaan kelembagaan dan pembinaan kapasitas. Pembangunan nasional dilaksanakan melalui *centrally blueprint plan* yang dirumuskan oleh teknokrat dan alokasi sumber pembangunan yang sentralis cenderung meyepelekan potensi masyarakat.

Model pembanguna yang demikian pada hakekatnya merupakan gaya pembangunan *delivered development*. Kecenderungan menerapkan gaya demikian menumbuhkan hubungan dependensi antara rakyat dan proyek pembangunan atau antara rakyat dan birokrat. Karenanya sifat dari dari pembangunan tersebut menjadi *disempowering*, menekankan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan potensinya. Kegagalan yang ditunjukkan oleh paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong para ahli untuk memikirkan paradigma baru sebagai koreksi dari kelemahan paradigm tersebut. Paradigm baru tersebut dikenal dengan paradigm kebutuhan dasar atau kesejahteraan.

2. Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar

Paradigma ini memfokuskan pada penduduk miskin di negara-negara berkembang. Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dan tidak hanya memecahkan masalah kemiskinan melalui mekanisme "*trickle down effect*". Pada dasarnya paradigma ini mencoba menggambarkan bahwa kesejahteraan merupakan sebuah program atau bantuan bagi orang yang sangat miskin melalui pemenuhan

kebutuhan dasar yang mencakup tidak hanya kesempatan memperoleh penghasilan akan tetapi juga akses terhadap pelayanan publik, seperti : pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum dan lain-lain.

Menurut streeten, Burki dan Ul Haq Paradigma ini juga didasarkan pada tiga argumentasi pokok yaitu :

- a. Banyak dari kaum miskin tidak memiliki aset-aset produktif selain kekuatan fisik mereka, keinginan kerja mereka dan inteligensi dasar mereka. Pemeliharaan aset tersebut tergantung pada peningkatan akses terhadap pelayanan publik seperti : pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyediaan air pada umumnya.
- b. Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi tidak meningkatkan standart hidup mereka kalau barang-barang dan jasa yang cocok dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tersedia.
- c. Peningkatan standar hidup golongan termiskin dari yang miskin melalui peningkatan produktivitas mereka memerlukan waktu yang sangat lama dan dalam porsi tertentu karena satu dan lain hal mereka barangkali tetap tidak dapat bekerja. Paling tidak program subsidi permanen diperlukan agar rakyat mendapat bagian dari hasil-hasil pembangunan.

Dalam paradigma ini, kesejahteraan rakyat menjadi orientasi utama. Tugas pemerintah adalah pemberi layanan terhadap masyarakat. Meskipun paradigma ini merupakan suatu langkah maju dalam memberikan pertimbangan dalam hal pembangunan manusia, dibandingkan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Namun, paradigma kebutuhan dasar juga tidak lepas dari kritik yang muncul. Para pendukung tata ekonomi internasional baru memandang paradigma kebutuhan dasar sebagai suatu usaha dari negara negara maju untuk menjaga negara-negara non industri agar tetap dalam kedudukan tergantung dan terbelakang dengan cara mengurangi keterikatan mereka untuk melakukan investasi dalam industrialisasi.

Selanjutnya David Korten (1983) mengkritik paradigma kebutuhan dasar karena kurang perhatian terhadap keterpuasan dari posisi umat manusia dalam keterpuasan. Hal tersebut mengingatkan bahwa “terwujudnya masyarakat mencapai kemakmuran yang melimpah, yang menjadikan si miskin menerima secara pasif pelayanan apapun yang dipilih serta diberikan oleh birokrasi pemerintah berdasar kearifan yang waktu dan tempatnya ditentukan pula oleh birokrasi pemerintah adalah tidak dapat diterima”. Inilah yang kemudian memunculkan sebuah paradigma baru sebagai bagian dari alternatif pembangunan yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia.

3. Pembangunan yang berpusat pada manusia

Paradigma ini berwawasan jauh kedepan bila dibandingkan dengan dua paradigma sebelumnya. Menurut Gran (1983) “peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability* manusia menjadi fokus sentral proses pembangunan, pelaksana pembangunan yang menentukan tujuan, sumber sumber pengawasan dan untuk mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Perspektif baru pembangunan tersebut memberikan peranan yang khusus pemerintah yang jelas berbeda dengan pemerintah pada paradigma sebelumnya. Peranan pemerintah pada pendekatan ini lebih kepada menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang yaitu, lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih benar. Menurut Korten (1986) pembangunan yang berpusat pada manusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut adalah :

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang di dalamnya rakyat memiliki identitas dan peran yang dilakukan sebagai partisipan yang dihargai.
- b. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri.

- c. Paradigma ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi.
- d. Di dalam melaksanakan pembangunan, paradigma ini menekankan pada proses belajar sosial "*sosial learning*" yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar.
- e. Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan yang cepat dan kaya kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horizontal dapat diwujudkan.
- f. Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri yang mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat lokal, organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah, bank-bank pedesaan dan lain-lain akan menjadi basis tindakan-tindakan lokal yang diarahkan untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar yang luas atas sumber-sumber dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber mereka.

Pembangunan yang berpusat pada manusia memandang manusia sebagai warga masyarakat baik sebagai fokus utama maupun sumber utama pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan dapat mengubah peranan masyarakat sebagai penerima pasif pelayanan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan aktif di dalam pembangunan.

Berbagai konsep mengenai pembangunan di atas menunjukkan bahwa dalam perkembangannya konsep pembangunan mengalami pergeseran paradigma. Ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan bersifat dinamis. Apa yang pada masa lalu dipandang sebagai sebuah paradigma yang baik ternyata sudah tidak

relevan pada saat ini dan muncullah paradigma baru sebagai kritik dan koreksi dari paradigma sebelumnya.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. (Cholisin, 2011)

Dari pengertian di atas, kemudian Cholisin secara lebih taktis menjelaskan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:

Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah **obyek** penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai **subyek** (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. (Cholisin, 2011)

Dari pendapat yang disampaikan oleh Cholisin menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan yang memang tepat adalah dengan melibatkan peran masyarakat secara lebih aktif dalam upaya pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Suharto (2005:59) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Penjelasan tentang pemberdayaan mengenai proses dan tujuan tersebut adalah :

“...pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses”.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa pemberdayaan dimaknai sebagai :

“ upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan

iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Selanjutnya menurut Adi (2008:84), “pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja”. Dalam setiap pemberdayaan yang dilakukan suatu pihak tentu di dalamnya mengandung maksud dan tujuan yang jelas. Suharto (2005:60) menyatakan bahwa “tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)”.

Adapun tujuan secara spesifik dari pemberdayaan usaha mikro menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dua usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
3. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif
4. Meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mempunyai tujuan untuk membantu pihak yang lemah menjadi lebih berdaya dengan cara meningkatkan kemampuan, kekuasaan, hingga keterampilan mereka agar dapat menjadi lebih mandiri dan sanggup menentukan sikap. Dalam hal

ini agar mereka mampu mengambil sebuah keputusan serta tindakan dalam menghadapi hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal yang mengganggu mereka dalam upaya melepaskan diri dari masalah kemiskinan yang dialami.

Seperti yang dijelaskan di atas, tujuan dari pemberdayaan itu adalah tercapainya masyarakat yang berdaya. Maka dari itu dapat kita pahami bahwa sasaran dari pemberdayaan adalah masyarakat yang tidak berdaya. Menurut Suharto (2005 : 60) bahwa terdapat beberapa kelompok yang bisa dimasukkan kedalam kategori sebagai kelompok tidak berdaya, antara lain :

1. Kelompok lemah secara struktural, contoh dari kelompok ini adalah lemah secara kelas dan gender
2. Kelompok lemah khusus, contoh anak-anak, manula dan masyarakat terasing
3. Kelompok lemah secara personal, contoh mereka yang mengalami permasalahan pribadi dan/atau keluarga

Sasaran pemberdayaan dalam program PUM/RTM secara spesifik dikhususkan secara spesifik kepada masyarakat miskin yang menjalankan usaha mikro. Menurut Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2007 bahwa pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha
2. Fasilitasi penguatan modal

Kedua hal tersebut sesuai dengan materi pemberdayaan dalam program PUM-RTM , yang didalamnya memasukkan unsur oenguatan institusi, penguatan modal serta peningkatan keterampilan. Institusi yang dibangun dalam program PUM-RTM adalah institusi keleompok berbentuk lembaga keuangan mikro masyarakat dan institusi sosial yang bernama Pokmas.kemudian untuk peningkatan keterampilan sasaran program itu dilakukan melalui pembekalan dan pembelajaran dalam hal memanfaatkan peluang usaha, cara mengelola modal yang mereka terima, hingga cara memanajmen usaha mereka.

Menurut Suyanto (1996:7) “kian miskin dan kian dipermiskin hidup seseorang atau sebuah keluarga, akan kian rendah dan menurun pula tingkat

keberdayaan orang atau keluarga itu dalam mengembangkan taraf hidupnya.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketidakberdayaan dan kemiskinan saling berhubungan satu sama lain dan akan diperparah ketika kemiskinan yang mereka alami semakin berat akan membuat mereka semakin tidak berdaya.

2.4 Evaluasi Kebijakan

Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan (Winarno, 2007: 225). Seringkali kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa singkat, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. (Jones dalam Winarno, 2007:226).

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson dalam Winarno, 2007:26). Sedangkan menurut Dunn (2000:608) evaluasi berkenaan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. William N. Dunn (2000:609-611) menjelaskan bahwa Evaluasi mempunyai beberapa fungsi.

1. Pertama, memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik;
2. Kedua, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Ketiga, memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda, berikut penjelasannya:

Tugas pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. *Tugas kedua*, adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan *standart* atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2007:226).

Dari pendapat yang disampaikan oleh Lester dan Stewart, kemudian secara lebih taksis, Jones menjelaskan bahwa dalam upaya memenuhi tugas tersebut, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*spesification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi (Jones dalam Winarno, 2007:227), berikut penjelasannya:

1. Spesifikasi merupakan kegiatan yang paling penting dibandingkan kegiatan yang lain. kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran atau kriteria inilah yang nantinya akan kita pakai untuk menilai manfaat program kebijakan;
2. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi;
3. Analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan;
4. Rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

2.4.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Subarsono, 2005:120-121).

2.4.2 Pendekatan terhadap Evaluasi Kebijakan

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2005:124), yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

a. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*)

Adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.

b. Evaluasi formal (*formal evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

c. Evaluasi proses keputusan teoritis (*desicion theoritic evaluation*)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholder*.

2.4.3 Tipe Evaluasi Program

Menurut Inayatullah (dalam Rohman, 2009:10) evaluasi terdiri dari tiga tipe yaitu sebagai berikut.

a. *Pre-programme evaluation*

Pre program evaluation dijalankan sebelum program diimplementasikan. Biasanya untuk mengukur tingkat kebutuhan dan potensi pengembangan dari target atau daerah tujuan, mengetest hipotesis program atau menentukan kemungkinan keberhasilan dari rencana program atau proyek (Inayatullah, dalam Rohman, 2009:10).

b. *On-going evaluation*.

On-going evaluation didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai “sebuah analisa, yang berorientasi pada aksi, tentang efek dan akibat dari proyek dibandingkan dengan antisipasi yang diambil selama pengimplementasian” (Inayatullah, dalam Rohman, 2009:10). PBB mendefinisikan sebagai berikut, ”*On-going atau concurrent evaluation* dijalankan selama pengimplementasian program. Menganalisa hubungan antara *output* dan efek atau kemungkinan yang mungkin timbul” (Inayatullah dalam Rohman, 2009:10). Fungsi dari *on-going evaluation* menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan solusi dari masalah yang timbul selama program dijalankan;
- 2) Mengecek apakah target sasaran program benar-benar mendapat keuntungan dari program;
- 3) Membantu manajemen program untuk beradaptasi terhadap "segala perubahan (tujuan dan kondisi-kondisi)" dan perubahan dari kebijakan yang berhubungan dengan tujuan, penataan-penataan institusi dan perubahan sumber-sumber yang memiliki dampak pada kebijakan selama pengimplementasian" (Inayatullah, 1980: 58 dalam rohman, 2009:11).

c. *Ex-post evaluation.*

PBB mendefinisikan *ex-post evaluation* sebagai proses yang diambil setelah pengimplementasian program, memeriksa efek dan akibat dari program, dan juga ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang (Inayatullah dalam Rohman, 2009:10) :

- 1) Keefektifan program dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan;
- 2) Kontribusi terhadap target-target perencanaan dan pengembangan sektoral ataupun nasional;
- 3) Akibat jangka panjang sebagai hasil dari kebijakan.

Bank Dunia mendefinisikan *ex-post evaluation* sebagai sebuah usaha untuk mereview (mengkaji ulang) secara komprehensif pengalaman dan akibat atau efek dari program sebagai sebuah basis untuk desain proyek dan formulasi kebijakan di masa depan (Inayatullah, 1980: 59 dalam rohman, 2009:10). *The ex-post* secara definisi adalah sebuah aktivitas yang diambil setelah penyelesaian proyek atau program.

Dari penertian di atas, penelitian ini lebih mengarah pada on going evaluation karena peneliti ingin melihat bagaimana tahapan program dilaksanakan, pola pemanfaatan program serta dampak yang ditimbulkan saat pengimplementasian program.

2.4.4 Jenis Evaluasi Program

Scriven (dalam Tayipnaps, 2000:36-37) mengklasifikasikan evaluasi menjadi dua jenis dasar evaluasi, yaitu sebagai berikut.

a. Evaluasi Formatif dan Sumatif

Evaluasi formatif dilakukan pada saat tahap implementasi program atau selama program berjalan yang bertujuan memberikan informasi untuk perbaikan program. Evaluasi ini biasanya memberikan informasi untuk memutuskan baik atau tidaknya suatu program. Berbeda dengan evaluasi formatif yang berfokus pada perbaikan program, evaluasi sumatif lebih berfokus pada memberikan informasi untuk mendukung keputusan atau membantu dalam membuat keputusan tentang implementasi program, melanjutkan program, atau pengembangan program. Pelaksanaan evaluasi sumatif pada akhir program atau setelah program berjalan, untuk memberi informasi tentang manfaat atau kegunaan program.

b. Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal

Sesuai dengan namanya, evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dari dalam proyek, dan evaluasi eksternal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dari luar.

Secara lebih rinci beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi menurut Ripley (Samodra Wibawa dkk, 1994:8-9 dalam Narendra Titis Hardjanti) adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam pembuatan kebijakan?
- b. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka, dan memenuhi prosedur?
- c. Apakah program didesain secara logis?
- d. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan?
- e. Apa standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut?
- f. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi?

- g. Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat?
- h. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program?
- i. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non-sasaran? Apa jenis dampaknya?
- j. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, terhadap masyarakat?
- k. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat?
- l. Apakah tindakan program dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan?

Dari berbagai persoalan tersebut, Samodra dkk (1994:9) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu : (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan dan (4) efektivitas dampak kebijakan. Pada penelitian ini evaluasi yang dilakukan lebih menekankan pada proses kebijakan itu dijalankan.

2.5 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM)

Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) merupakan inovasi program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Jember. Program ini dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. LKMM dikenal dengan istilah Bank Gakin oleh para anggotanya. Bank Gakin adalah sebutan yang diberikan sendiri oleh warga miskin yang menjadi anggotanya. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh beberapa pengurus dan anggota Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro (LKMM) sebagai antitesis terhadap bank formal yang selama ini tidak pernah mau peduli dengan ekonomi keluarga miskin. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2005. Tujuan utamanya adalah perempuan miskin dan produktif. Inovasi PUM-RTM dirancang secara khusus dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan mengembangkan usaha mikro sebagai alternatif usaha sampingan, berbasis pada penguatan institusi, berorientasi

pada keberlanjutan usaha serta menyentuh langsung pada keluarga miskin. Kegiatan PUM-RTM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Aktivitas penguatan modal usaha dilaksanakan setelah penguatan institusi dilakukan secara benar. Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya dua institusi yaitu institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro) dan institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat).

Pada awalnya program ini akan diimplementasikan pada tingkat desa. Namun karena wilayah desa dianggap masih terlalu luas, wilayah kerja Keuangan Mikro Masyarakat dipersempit menjadi tingkat dusun. Semakin sempit wilayah kerja diprediksi akan semakin efektif. Dusun Semenggu dan Mojan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang terpilih sebagai pioner karena masyarakat di kedua lokasi tersebut telah di-*black list* lembaga perbankan. Dengan modal dana hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM sebesar dua puluh lima juta rupiah dan simpanan sukarela anggota, kedua Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat tersebut telah mampu melayani sekitar 30 kelompok yang beranggotakan lebih dari 150 kepala keluarga.

Bank Gakin di kabupaten Jember menggunakan prinsip tanggung renteng di antara para anggotanya. Kelompok usaha yang terdiri atas 5-10 orang dapat mengajukan kredit usaha tanpa agunan antara Rp 50.000 hingga Rp 1 juta. Masyarakat yang mengajukan kredit tidak perlu menyerahkan proposal usaha, apalagi melalui survei yang berbelit. Proposal bisa diajukan secara lisan. Dana kredit bisa langsung cair setelah diadakan *survey* sekilas terhadap usaha yang dijalankan. Dengan kucuran kredit berjangka waktu 10 minggu yang diangsur setiap minggu dengan bunga 0,5 persen, terobosan ini sangat membantu kelompok usaha kecil dan menengah. Anggota satu Bank Gakin maksimal 200 orang warga miskin. Jika lebih dari 200 orang, bank akan mengalami kesulitan dari sisi pengelolaan. Bank ini dikelola sendiri oleh warga miskin, di mana 90% pengurusnya adalah perempuan. Sebanyak 46% di

antaranya adalah lulusan sekolah dasar dan 5% tidak melewatkan pendidikan sekolah formal (Handayani, 2010).

Program PUM-RTM ini merupakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Adapun tujuan secara spesifik dari program PUM-RTM ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM)
2. Menyediakan sumber permodalan untuk pengembangan usaha mikro.
3. Mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
4. Memfasilitasi terbentuknya institusi ekonomi yang bernama LKMM serta terbentuknya institusi sosial (PokMas). (Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan LKMM)

Adapun sasaran program PUM-RTM ini adalah sebagai berikut.

1. Lokasi PUM-RTM diprioritaskan pada desa/kelurahan dengan jumlah penduduk miskin yang relative tinggi termasuk juga wilayah yang terkena bencana.
2. Wilayah pelayanan LKMM dan pembentukan Pokmas diprioritaskan pada lingkup dusun/lingkungan.
3. Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) diprioritaskan pada RTM usia produktif, perempuan, menikah, dan telah memiliki usaha atau pernah berusaha dan berencana membuka usaha baru atau RTM yang belum berpengalaman usaha tetapi memiliki motivasi tinggi untuk merintis usaha (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2008:7).

Program PUM-RTM ini mempunyai kegiatan pokok yaitu penguatan institusi sosial-ekonomi kemasyarakatan. Wujud dari kegiatan tersebut adalah pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat atau Pokmas dan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat atau LKMM (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2009:2). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa

institusi sosial yang dibentuk dalam program ini bernama Pokmas Rumah Tangga Miskin. Adapun penjelasannya secara rinci adalah sebagai berikut.

“Pokmas-RTM atau Kelompok Masyarakat Rumah Tangga Miskin adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara bekerja sama dalam kelompok dan menguatkan anggota kelompok, beranggotakan maksimal 5 (lima) orang ibu-ibu rumah tangga miskin dalam suatu wilayah tertentu terutama berdomisili berdekatan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.” (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:2).

Adapun tujuan dari kegiatan pembentukan Pokmas adalah sebagai berikut.

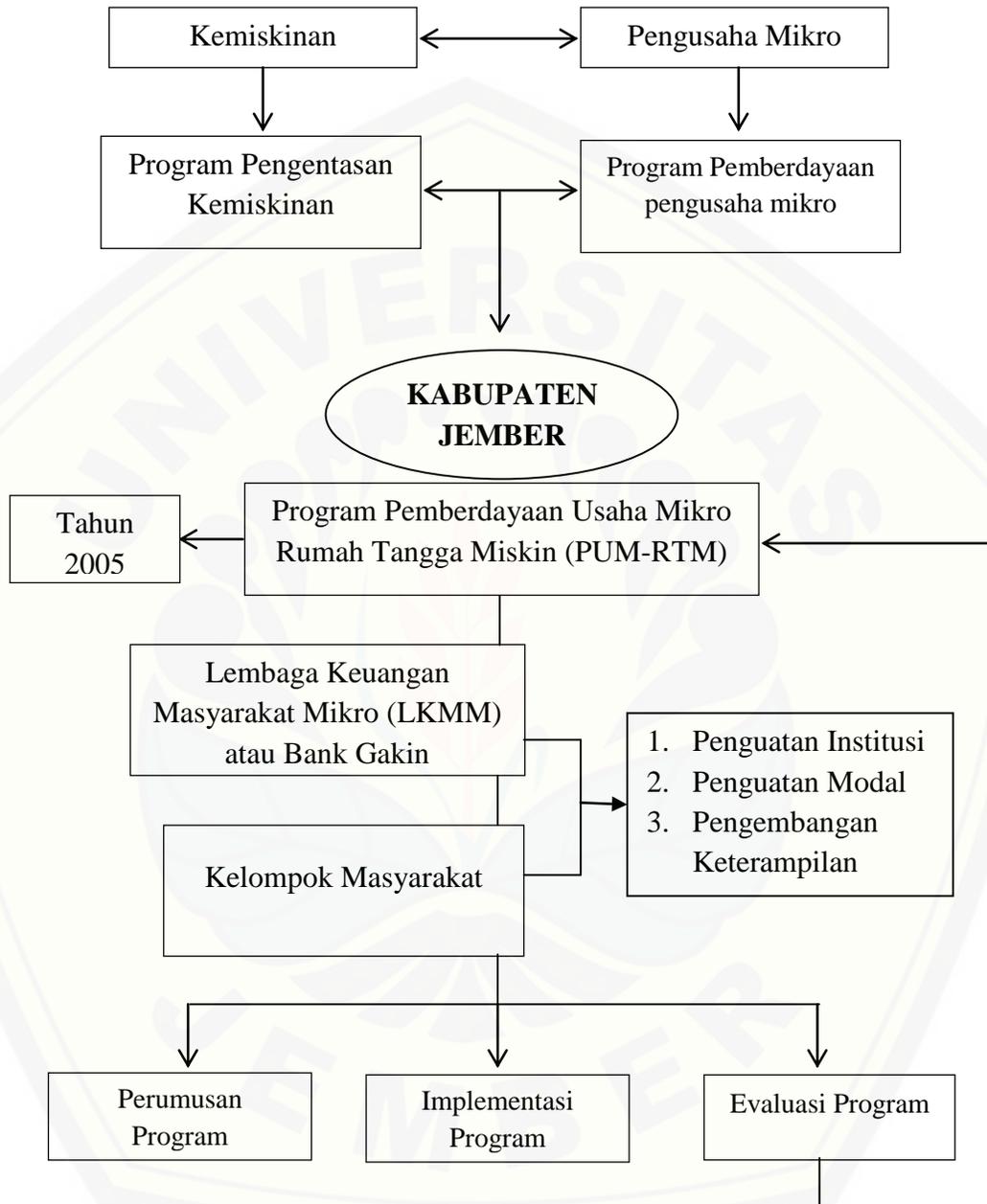
1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya capital sosial.
2. Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan.
3. Mendorong proses pemberdayaan berjalan secara efektif dan efisien.
4. Mendukung terjadinya proses saling asah-saling asuh antar sesama anggota.
5. Terjadinya konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah didalam satu Pokmas (konsep sapu lidi)
6. Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, wada proses belajar/interaksi antar anggota, menggerakkan keswadyaan dan modal, meningkatkan, dan menertibkan angsuran pinjaman, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota, dll[sic] (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2007:25-26)

Kemudian yang kedua adalah intitusi ekonomi yang bernama Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat atau LKMM adalah “lembaga keuangan informal prakoperasi yang mengelola simpan pinjam yang melayani pengusaha mikro perempuan dari keluarga miskin dengan pola tanggung renteng” (Dinas Koperasi UMKM Kabupetan Jember, 2010 : 37). Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa LKMM merupakan lembaga keuangan yang mengelola dan menyediakan dana bagi para anggota Pokmas yang membutuhkan dan mengakses permodalan ditempat tersebut.

2.6 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat memberi jalan bagi proses menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berpikir dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan seperti di bawah ini :





Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dapat dikatakan pula bahwa hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Menurut Usman dan Akbar (2003:42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sugiono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya. Peneliti akan dapat menemukan jawaban atas masalah penelitian jika peneliti mampu menggunakan metode penelitian yang tepat untuk mengupas masalah-masalah yang ada.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Fokus penelitian
3. Tempat dan waktu penelitian.
4. Data dan sumber data.
5. Penentuan informan penelitian.
6. Teknik dan alat perolehan data.
7. Teknik penyajian dan analisis data.
8. Teknik menguji keabsahan data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Di dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Secara lebih sederhana, Kountur (2003:105) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian yang mampu memberi gambaran atau uraian secara jelas tentang suatu keadaan tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Ciri-ciri penelitian deskriptif menurut Kountur (2003:105) antara lain: berhubungan dengan suatu keadaan yang terjadi saat itu, mampu menguraikan satu variabel atau beberapa variabel namun tetap diuraikan satu persatu, serta tidak adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Menurut Kountur (2003:18), dalam pendekatan kualitatif proses penelitian bersifat induktif yang diawali dengan suatu pengamatan khusus terhadap objek penelitian untuk dapat menghasilkan teori baru secara umum. Dengan kata lain menurut Sudjana (1991:7), proses berpikir induktif tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum tetapi berawal dari proses pengamatan atas fakta atau data khusus di lapangan. Sesuai dengan uraian penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif di atas, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang evaluasi dari program PUM-RTM

yang sarasannya adalah kelompok masyarakat rumah tangga miskin di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2014.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian berfungsi untuk memberikan batasan permasalahan yang diteliti, sehingga kajian dalam penelitian ini menjadi lebih spesifik dan jelas. Adapun beberapa fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Tahapan PUM-RTM dilakukan, yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal, tahap peningkatan keterampilan di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang.
2. Cara masyarakat penerima program dalam mengelola PUM-RTM, yaitu dalam pengelolaan: 1) LKMM 2) masyarakat penerima program.
3. Dampak yang ditimbulkan dari program PUM-RTM

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai tempat atau lokasi penelitian. Kelurahan Bintoro dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

1. Belum ada yang melakukan penelitian di Kelurahan Bintoro yang mengkaji secara mendalam terkait evaluasi PUM-RTM.

2. Kelurahan Bintoro merupakan kelurahan pertama kali menerima program PUM-RTM di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, waktu penelitian dilakukan oleh peneliti ada pada tahun 2015 diharapkan peneliti mampu mendiskripsikan program PUM-RTM di Kelurahan Bintoro. Sedangkan peneliti membatasi rentang waktu pada tahun 2014 laporan kinerja LKMM Kabupaten Jember untuk memberikan gambaran dinamika yang terjadi terkait program PUM-RTM terhadap kelompok sasaran program tersebut.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data di bagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan di atas untuk mendukung proses penelitian. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung dan hasil wawancara kepada para informan terkait program yang diimplementasikan, pelaksanaan tahapan program, pemanfaatan program, dan dampak yang dihasilkan.

Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data laporan kinerja LKMM Kabupaten Jember, serta dokumen-dokumen

lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan LKMM, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri, peraturan bupati, serta keputusan-keputusan bupati. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi, serta menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap jenuh (hasil tetap). Alat pengumpul data atau instrumen dalam metode ini adalah peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan instrument kunci, sehingga ketika mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif (Usman dan Akbar, 2009:80).

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2011: 85), teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
3. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.

5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang terpilih melalui teknik *sampling purposive* seperti penjelasan di atas dengan pertimbangan bahwa beberapa informan ini merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui latar belakang dalam program PUM-RTM di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Beberapa informan tersebut sebagai berikut.

1. Bapak Agus Budi Santoso selaku Kepala sie bagian UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember
2. Ibu Juha, Ibu Faiqotus, Ibu Yuliana, Uswatun Hasanah selaku Ketua LKMM Semenggu, Plalangan, Krajan, dan Perbal
3. Anggota kelompok LKMM Krajan, Plalangan dan Perbal

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2011:223), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Faisal (1990) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2011:226), observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar,

serta observasi yang tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti sedari awal berterus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi peneliti.

Hal-hal atau fenomena yang menjadi fokus observasi peneliti adalah LKMM yang dikelola oleh masyarakat terkait dengan tahapan pelaksanaan program, pemanfaatan program serta dampak program terhadap masyarakat. Sehingga berdasarkan observasi tersebut, peneliti mendapatkan data terkait tahapan pelaksanaan program, pemanfaatan program serta dampak program terhadap masyarakat di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang.

2. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semiterstruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses adalah buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Usman dan Akbar (2003:73) memaparkan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari

dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan program PUM-RTM di Kelurahan Bintoro. Dokumen tersebut antara lain: Laporan Kinerja LKMM Kabupaten Jember, Petunjuk Pelaksanaa Program, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan PUM-RTM, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan-peraturan lain. Selain itu, dokumentasi berupa foto, catatan harian, dan hasil rekaman proses observasi dan wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini.

4. Triangulasi

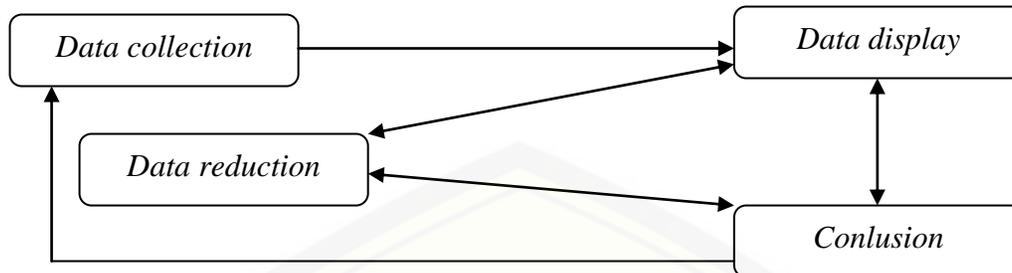
Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Prastowo (2012:231), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data gabungan. Teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data digunakan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu fenomena yang diamati. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:241) yang menyatakan bahwa triangulasi digunakan oleh peneliti bukan hanya sebatas sebagai teknik untuk mengumpulkan data, akan tetapi peneliti juga dapat sekaligus melakukan *cross check* kredibilitas data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan sumber data yang lain.

Secara lebih lanjut, Sugiono (2011:241) membagi triangulasi dalam dua kategori, yaitu: triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2011:241), merupakan teknik yang dipakai ketika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Sementara itu, triangulasi sumber data menurut Sugiono (2011:241), merupakan teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237), berbicara tentang teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif artinya berbicara tentang cara mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Sementara itu, Moleong (2012:247) secara lebih taktis menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Setelah menelaah data yang telah terkumpul, peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses *koding*. Tahap analisis data yang diterakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada.

Senada dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Sumber: Miles dan Huberman, 2007:20 yang dikutip dari Prastowo, 2012:243)

Gambar 3.1 di atas memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243), menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat (2012:242) bahwa proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan selama pengumpulan data berlangsung bahkan proses ini terjadi setelah penelitian lapangan berakhir dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam analisis data kualitatif menurut Prastowo (2012:244), terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakannya. Penyajian data yang benar akan mampu membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif ini. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi

data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman. Setelah semua data yang terkumpul dijamin dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Menurut Sugiyono (2011:253), kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar bahkan gelap.

Menurut Prastowo (2012:249) proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi membuat sebuah proses jalinan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah proses pengumpulan data untuk membangun sebuah wawasan secara umum ini dikenal dengan istilah analisis. Melalui model analisis data kualitatif ini, peneliti dalam penelitian ini mencoba menganalisis data yang telah terkumpul untuk mampu menghasilkan sebuah informasi baru yang menjadi jawaban terkait evaluasi PUM-RTM.

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data menjadi sangat penting agar temuan hasil penelitian yang didapat oleh seorang peneliti dapat dipercaya atau diakui validitas dan realibilitasnya. Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Untuk itu dirasa sangat perlu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai

salah satu metode penelitian. Menurut Moleong (2012:327) teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri delapan tahapan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik pemeriksaan
Kredibilitas	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Keterangan	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastiaan

Sumber: Lexy Moleong (2006:327) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Ketekunan atau kejegan pengamatan.

Ketekunan dan kejegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Dalam proses ini, peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan atau kejegan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

2. Triangulasi.

Menurut Moleong (2012:330), triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi

yang ada dalam proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:323), triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut.

- a. Mengajukan pertanyaan yang bervariasi.
- b. Mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber.
- c. Menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

Menurut Denzin (dalam Moleong, 2006:330) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori. Berikut adalah empat macam triangulasi yang diungkap oleh Denzin.

- 1) *Data triangulation* (sumber), teknik yang menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk pengumpulan data yang sama
- 2) *Investigator triangulation* (penyidik), adalah pengumpulan data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti
- 3) *Methodological triangulation* (metode) adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- 4) *Theoretical triangulation* (teori) yaitu peneliti melakukan penelitian dengan topik yang sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan perspektif.

Dari keempat macam triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari kebenaran yang diungkapkan informan satu dengan informan yang lain. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada setiap informan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan antar pengumpulan data, misalnya data yang didapat dari wawancara dengan data yang didapat dari observasi atau dokumentasi.

3. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial mempunyai konsep sebagai alat untuk memuat dan menyesuaikan kritik tertulis untuk evaluasi. Peneliti menggunakan media tulis saat wawancara dan observasi berlangsung, hal ini lebih memudahkan penulis karena catatan yang berupa tulisan tidak rawan hilang atau terhapus.

4. Uraian rinci.

Uraian rinci merupakan teknik menguji keabsahan data yang berikutnya. Dalam teknik ini, peneliti dituntut untuk memberikan hasil penelitiannya dengan cermat dan teliti berupa uraian-uraian yang rinci. Uraian yang diungkapkan oleh peneliti dikemas secara khusus untuk memberikan penafsiran atas kejadian-kejadian nyata yang ada. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman atas fenomena yang diamati.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir dan merupakan pernyataan akhir penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang terdapat 3 LKMM. Berdasarkan analisis dan pembahasan atas data yang terkumpul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari hasil Evaluasi penguatan institusi bahwa tidak semua kelompok menjalankan fungsi yang ditetapkan oleh dinas diantaranya tidak adanya struktur organisasi, tidak adanya AD/ART, buku penunjang administrasi yang ada buku besar serta tidak adanya rapat-rapat yang dilakukan baik antar pengurus maupun kepada anggota. Dari beberapa LKMM yang ada di Kelurahan Bintoro, LKMM yang masih sehat dalam merekrut anggota kelompok adalah LKMM Krajan yaitu benar benar perempuan produktif dari pada LKMM Plalangan dan LKMM Perbal. Keseluruhan LKMM tidak berbentuk kelompok masyarakat yang dianjurkan oleh dinas.
2. Pada Evaluasi penguatan modal yaitu dana hanya dikucurkan pada awal program berjalan yaitu Rp 25.000.000,- dan tidak ada tambahan dana dari dinas yang bersumber dari APBD atau dana lainnya. Usaha pengurus dalam mempermudah proses pinjaman yaitu dengan tidak ada jaminan yang di tetapkan oleh pengurus guna dapat meminjam uang pada LKMM.
3. Tahapan Evaluasi pengembangan keterampilan di Kelurahan Bintoro, masing-masing LKMM tidak melakukan kegiatan yang bersifat pengembangan ketrampilan. Kegiatan keterampilan yang dilakukan hanya oleh dinas kepada

pengurus LKMM sedangkan LKMM tidak melakukan kegiatan tersebut kepada anggota.

4. Evaluasi Pola pemanfaatan dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Pola Pemanfaatan program yang dilakukan oleh LKMM

Modal usaha yang diberikan oleh LKMM Krajan ditujukan kepada perempuan produktif, sedangkan LKMM Plalangan ditujukan kepada siapapun yang mau pinjam termasuk laki-laki dan hal berbeda pada LKMM Perbal yaitu ditujukan kepada guru guru yang mengajar di yayasan. besaran bunga yang ditetapkan oleh ketiga LKMM tersebut sebesar 10 persen dan bunga tersebut dikembalikan lagi ke modal agar modal utama bertambah.

b. Pola pemanfaatan program yang dilakukan oleh anggota

Pada LKMM Krajan modal yang didapatkan digunakan untuk keperluan usaha baik berupa toko, *pracangan*, dan *mlijo*. Sehingga keuntungan yang diperoleh digunakan untuk modal usaha kembali sebagian dan sebaiannya lagi digunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah dll. Modal yang di dapat oleh anggota LKMM plalangan digunakan untuk keperluan sehari-hari, keperluan sawah dan membayar hutang. Hampir sama dengan LKMM Plalangan, anggota LKMM Perbal juga memanfaatkan hasil pinjaman untuk keperluan sehari-hari, keperluan dadakan dan keperluan sekolah anak.

5. Evaluasi dampak Pelaksanaan Kebijakan PUM-RTM di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang ada yang menimbulkan dampak dan tidak. LKMM Plalangan dan Perbal tidak menimbulkan dampak karena sasaran dari program tersebut sangat tidak tepat yang harusnya perempuan produktif disana diberikan kepada siapaun yang mau minjam tanpa melihat punya usaha apa tidak dan diberikan kepada guru-guru yayasan. Sehingga dampak dari program tidak bias dilihat mendalam. Adapun yang menimbulkan dampak adalah LKMM Krajan. Dampaknya adalah sebagai berikut :

a. Membantu penguatan modal

Meskipun sedikit modal yang dipinjam namun keberadaan kebijakan sangat membantu guna menambah modal usaha.

b. Perkembangan usaha

Adanya modal usaha yang dipinjamkan memang tidak bias langsung diukur karena hasil yang dicapai langsung dipakai guna mencukupi kegiatan sehari-hari dan perputaran modal. Namun perkembangan dirasakan ada.

c. Pendapatan meningkat

Sama halnya dengan perkembangan usaha karena modal yang sedikit maka peningkatan pendapatan tidak bias langsung ditulis secara jelas. Mencukupi keperluan sehari-hari sudah merupakan hal yang membanggakan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran untuk proram PUM-RTM yang ada di kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas lebih aktif mengontrol baik berupa keuangan ataupun kegiatan yang dilakukan sehingga LKMM bisa lebih sehat dan hidup dalam mengadakan kegiatan
2. Adanya penambahan modal usaha pada LKMM yang berprestasi. Ukuran berprestasi bukan semata mata dilihat dari angsuran yang lancer tapi seberapa tepat sasaran program dilakukan.
3. Menutup atau mengambil alih hak LKMM jika ditemukan LKMM yang sudah tidak bisa diperbaiki dalam hal pengelolaan dan penentuan target sasaran. Karena dengan dana yang dikururkan memang untuk masyarakat miskin banyak dinikmati oleh yang bukan orang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana.
- Cholisin, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat. Handout* yang disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian tahun 2011 di Lingkungan Kabupaten Sleman pada 19-20 Desember 2011.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gunawan. 2012. *Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar Industri Pertambangan (di Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong)*.
- Handayani, Ririn. 2010. *Bangkit bersama Bank Gakin*. Gemari Edisi 114/TahunXI/Juli 2010.
- Kusnaedi. 1995. *Membangun Desa; Pedoman Untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya, Anggota IKAPI.
- Mardikanto, totok.2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspekti kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Prasetyo, Eka. 2008. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*. Volume 2. Akmenika UPY.
- Pratiwi, Nuraida. M. K. E. 2013. Skripsi. *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam Optimalisasi Pelaksanaan Kemitraan Berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) yang Dilakukan Oleh PT. Semen Gresik*. FISIP-Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Jember: Universitas Jember.

- R, Soetrisno. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press, Badan Kerja Sama Fakultas Filsafat UGM.
- Rohman, Hermanto. 2009. *Monitoring dan Evaluasi: Media Pembelajaran Pengamatan di Lapangan Jember: Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*: Universitas Jember. Booklet materi kuliah.
- Santosa, Edi. *Berbagi Urusan Kemiskinan*.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Kemitraan Dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Syafi'i, Mohammad. 2011. *AmpihMiskin Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Kandangan: Averroes Press
- Syafi'i, Muhammad. 2014. Skripsi. Evaluasi Program Keluargaharapan di Desa Jamekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2013. FISIP-Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Jember: Universitas Jember.
- Ulum, Lessy, Indrajaya, Nurjannah, Sriharini, Munawir, Noorkamilah. 2007. *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Internet:

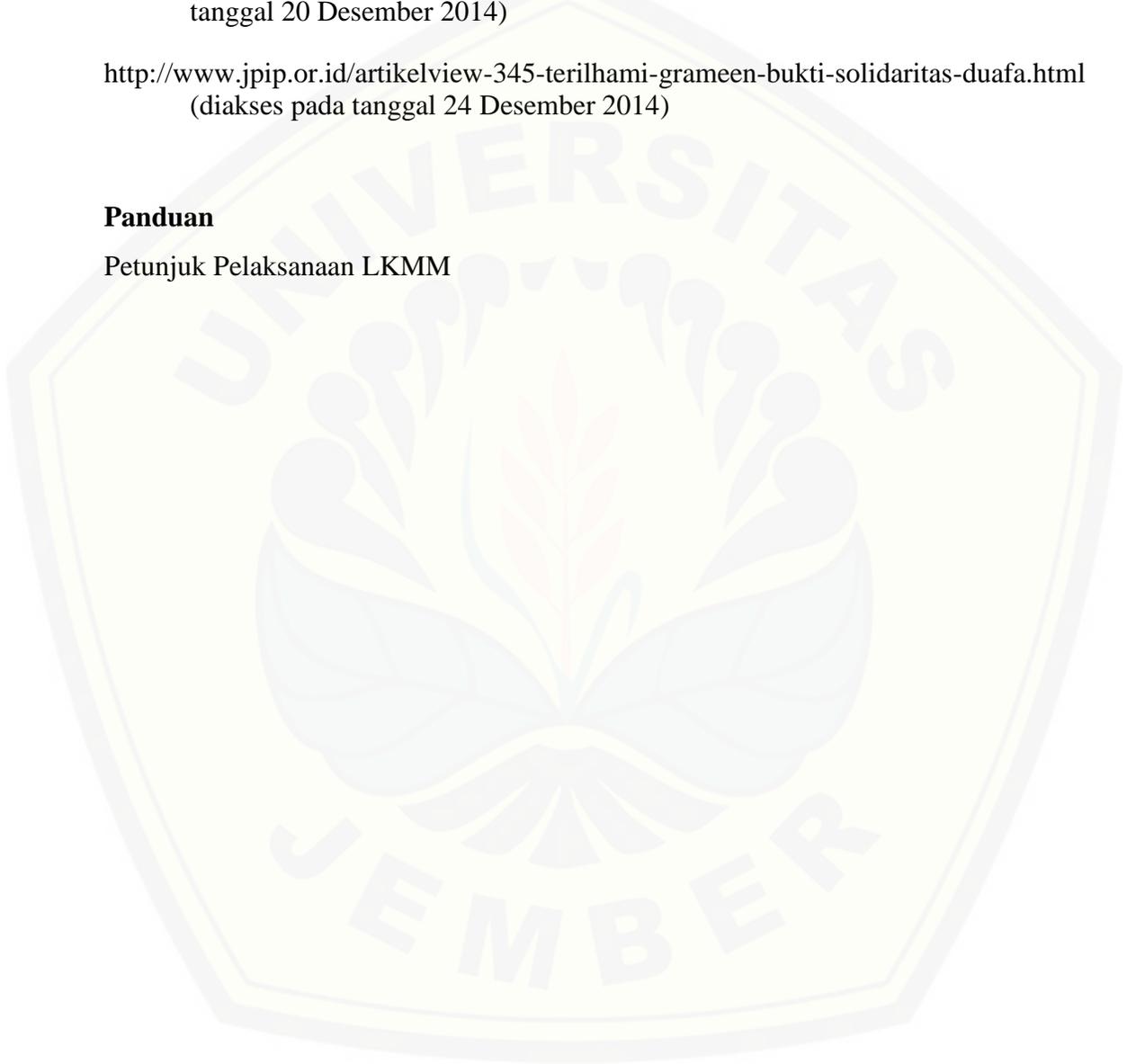
<http://www.BPS.go.id> (diakses pada tanggal 20 Desember 2014)

<http://umum.kompasiana.com/2009/03/12/bank-gakin-4167.html> (diakses pada tanggal 20 Desember 2014)

<http://www.jpip.or.id/artikelview-345-terilhami-grameen-bukti-solidaritas-duafa.html> (diakses pada tanggal 24 Desember 2014)

Panduan

Petunjuk Pelaksanaan LKMM



LAMPIRAN A. PEDOMAN WAWANCARA

1. PENGEMBANGAN INSTITUSI

- a. Bagaimana proses membentuk kelompok?
- b. Siapa saja yang boleh jadi pengurus dan anggota kelompok?
- c. Apakah ada penambahan anggota atau kelompok disini dari tahun pertahun?
- d. Apa pertimbangan yang digunakan untuk penetapan pengurus baik ketua sekretaris dan bendahara?
- e. Apa pertimbangan orang mendapatkan dana dari LKMM?
- f. Apakah ada jaminan untuk si peminjam?
- g. Bagaimana hasil perputaran modal?
- h. Bagaimana mengatasi kredit macet dari anggota?

2. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN

- a. Bagaimana kemampuan anggota dan pengurus dikelompok ?
- b. Apakah ada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan keterampilan pengurus yang dilakukan oleh dinas?
- c. Bagaimana sistem pembukuan di LKMM?
- d. Apakah ada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat yang dilakukan oleh LKMM?

3. PENGUATAN MODAL

- a. Apakah LKMM memiliki tambahan dana alternative dari APBD?
- b. Apakah ada peningkatan jumlah modal yang diberikan oleh dinas koperasi?

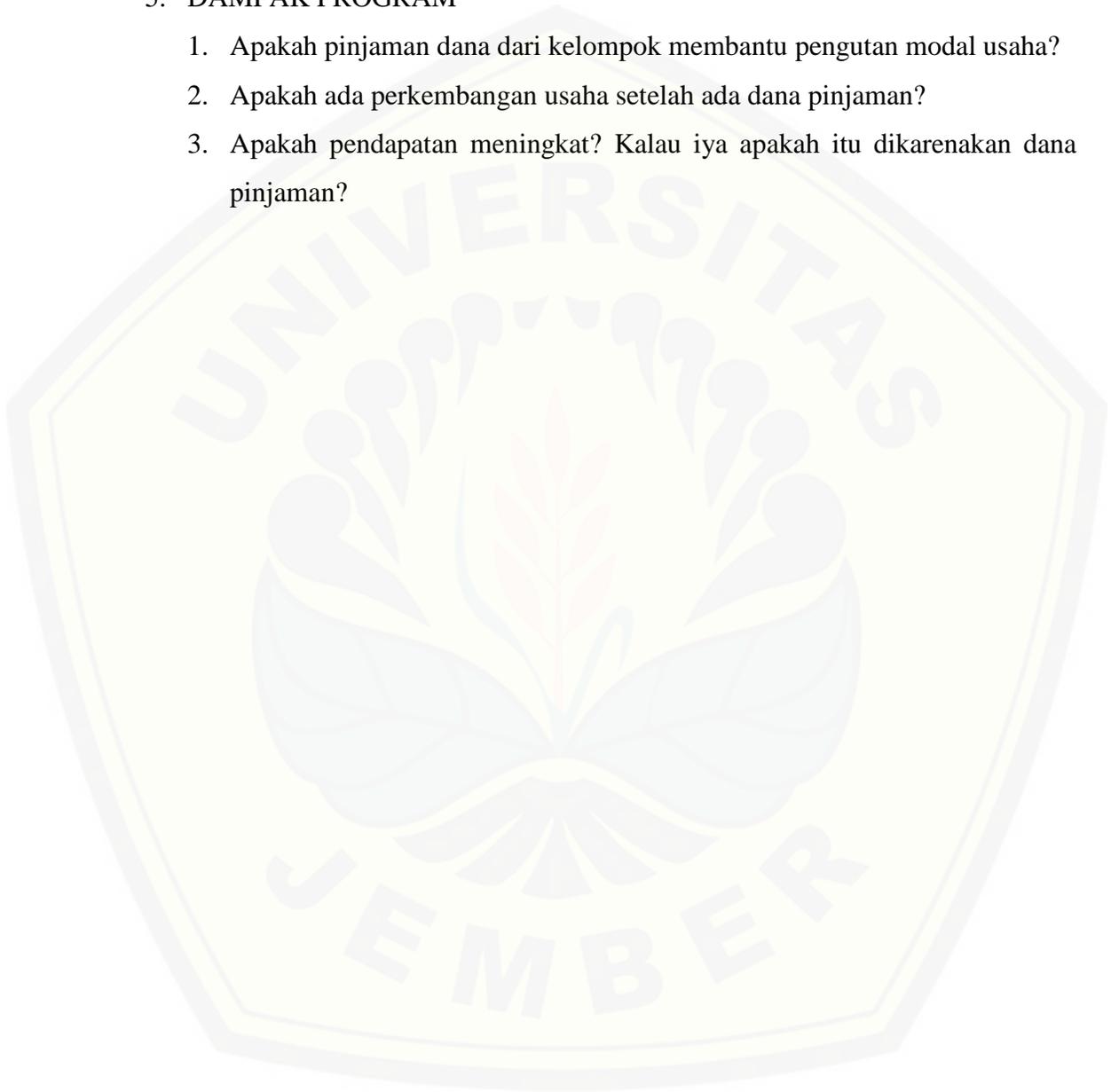
4. POLA PEMANFAATAN USAHA

- a. Siapa saja yang boleh meminjam dana pada kelompok?
- b. Digunakan untuk apa modal usaha tersebut?
- c. Setelah mendapat keuntungan, untungnya digunakan buat apa?
- d. Dari hasil bunga pinjaman digunakan untuk apa oleh LKMM?

- e. Bagaimana pertanggungjawaban modal awal dan bunga 1% - 5%?
- f. Apakah benar standart bunga yang diperlakukan adalah 1% - 5%?

5. DAMPAK PROGRAM

- 1. Apakah pinjaman dana dari kelompok membantu pengutan modal usaha?
- 2. Apakah ada perkembangan usaha setelah ada dana pinjaman?
- 3. Apakah pendapatan meningkat? Kalau iya apakah itu dikarenakan dana pinjaman?



LAMPIRAN B. DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Jember



Wawancara dengan sekretaris LKMM Krajan ibu Yuliana



Wawancara dengan Bendahara LKMM Plalangan Ibu Faiqotus



Wawancara dengan ketua Koperasi Wanita Semunggu Ibu Juhariyah



Wawancara pada Anggota Kelompok LKMM Krajan



Wawancara pada Anggota Kelompok LKMM Plalangan



Wawancara dengan Anggota LKMM Perbal



Wawancara dengan Anggota LKMM Perbal

No. BKM : **BUKTI KAS MASUK (BKM)** Tanggal :

Telah terima dari :
 Banyaknya Uang : Rp.
 Untuk Pembayaran : (.....)

No.	N A M A	SIMPANAN			ANGSURAN	
		WAJIB	SK. RELA		POKOK	JASA
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Jumlah						

Mengetahui _____ Diterima oleh Kasir _____ Penyetor _____

Keterangan :
 Lembar 1 : Penyetor
 Lembar 2 : Juru Buku

PINJAMAN

Tanggal Bulan Tahun	Pokok Pinjaman	Ke	Angsuran Pokok	Jasa	Sisa Pinjaman	Paraf Benda Hara
9/6	600					
14/6		1	60	3	540	
23/6		2	60	3	480	
30/6		3	-	-	-	
7/7		4	60	3	420	
25/8		5	60	3	360	
1/9		6	60	3	300	
8/9		7	60	3	240	
15/9		8	60	3	180	
22/9		9	60	3	120	
29/9		10	60	3	60	

PEMEGANG

Nama :

Anggota No. :

Pekerjaan :

Alamat :

Mulai Masuk Anggota :
 Jember, 20

Tanda tangan
 Pemegang _____ Pengurus. _____

Administrasi Pinjaman LKMM Plalangan

Uraian Keuangan
Lkmm Plalangan
Per Mei 2014

AKTIVA	Rp	PASSIVA	Rp
- Kas	857.000	HUTANG LANCAR	3.116.000
- BANK	250.000	- Simpanan sukarela	5.136.000
- PIUTANG	42.000.000	- hutang Bank	
Jumlah Aktiva Lancar	43.107.000	Jumlah hutang lancar	5.136.000
AKTIVA TETAP		DANA ?	
- INVENTARI KANTOR	300.000	- Dana Sosial	2.000.000
- Lain ?		- " Pendidikan	2.496.100
Jumlah Aktiva Tetap		- " Pokmor	2.496.100
		- " Pengurus	
		Jumlah Dana itu	4.996.100
		- Hutang jangka panjang	
		MODAL SENDIRI	
		- sp Pokor	790.000
		- " wajib	
		- DONASI	25.000.000
		- CADANGAN	6.000.000
		- shu berjalan	5.198.000
		Jumlah modal sendiri	37.984.000
	43.464.000		43.132.000

Jember 01 - Juni - 2014

Mengetahui
KORPORATOR
Faiqotul Sholihah

Mengetahui
Juru Buku
ST. Romlah

Date
PERHITUNGAN LABA / RUGI
PER JUNI 2014

I Pendapatan		4.561.000,00
- Jasa		973.000,00
- Administrasi		10.000,00
- Buku tabung		5.540.000,00
Jumlah pendapatan		
II BIAYA ?		
- ATK		
- Transport		
- Honor		
- konsumsi		
- lain ?		
Jumlah biaya ?		
III LABA / RUGI		5.540.000

Jember 1 Juli 2014

Mengetahui
KORPORATOR
Faiqotul Sholihah

Mengetahui
Juru Buku
ST. Romlah

Date
Uraian Keuangan
Lkmm Plalangan
Per JUNI 2014

AKTIVA	Rp	PASSIVA	Rp
- Kas	1.797.000	HUTANG LANCAR	3.116.000
- BANK	250.000	- Simpanan sukarela	5.136.000
- PIUTANG	42.000.000	- hutang Bank	
Jumlah Aktiva Lancar	43.947.000	Jumlah hutang lancar	5.136.000
AKTIVA TETAP		DANA ?	
- INVENTARI KANTOR	300.000	- Dana Sosial	2.000.000
- Lain ?		- " Pendidikan	2.496.100
Jumlah Aktiva Tetap	300.000	- " Pokmor	2.496.100
		- " Pengurus	
		Jumlah dana itu	4.996.100
		- Hutang jangka panjang	
		MODAL SENDIRI	
		- sp Pokor	790.000
		- " wajib	
		- DONASI	25.000.000
		- CADANGAN	6.000.000
		- shu berjalan	5.198.000
		Jumlah modal sendiri	37.984.000
	43.947.000		43.132.000

Jember 1 Juli 2014

Mengetahui
KORPORATOR
Faiqotul Sholihah

Mengetahui
Juru Buku
ST. Romlah

Date
PERHITUNGAN LABA / RUGI
PER JULI 2014

I Pendapatan		4.630.000,00
- Jasa		973.000,00
- Administrasi		10.000,00
- Buku tabung		5.540.000,00
Jumlah pendapatan		
II BIAYA ?		
- ATK		
- Transport		
- honor		
- konsumsi		
- lain ?		
Jumlah biaya ?		
III LABA / RUGI		5.621.000

Jember 1 Agustus 2014

Mengetahui
KORPORATOR
Faiqotul Sholihah

Mengetahui
Juru Buku
ST. Romlah

LAMPIRAN C. PERATURAN-PERATURAN



BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 13 TAHUN 2013

**TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN MODAL
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT
KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong produktifitas dan peningkatan pendapatan keluarga miskin diperlukan infrastruktur ekonomi berupa Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di wilayah Dusun/Lingkungan yang berperan melayani pinjaman modal usaha kepada pengusaha mikro berbentuk simpan pinjam secara bergulir dengan pola tanggung renteng ;

- b. bahwa untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) perlu modal stimulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember ;
- c. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan bantuan modal dan kesinambungan pelayanan kepada keluarga miskin oleh pengelola LKMM secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya maka perlu ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Modal Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 4. Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
 - 6. Undang - Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

7. Undang - Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008.
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember.
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2008 Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
25. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013..
27. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 Tentang Penggunaan APBD Tahun 2013
28. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN BANTUAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan yang menangani Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
7. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat yang selanjutnya disebut LKMM adalah Lembaga Keuangan Informal Pra Koperasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi,UMKM Kabupaten Jember untuk mengelola simpan

pinjam kepada anggotanya yaitu pengusaha mikro keluarga miskin dengan pola tanggung renteng.

9. Modal adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember yang dipergunakan sebagai modal benih (seed capital) bagi LKMM.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Pedoman Umum adalah untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan bantuan modal kepada LKMM
- (2) Pedoman Pelaksanaan dari Pedoman umum disusun Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Modal LKMM dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 3

Sumber dana berupa bantuan hibah dipergunakan sebagai modal benih (seed capital) bagi Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat yang dikelola secara mandiri dengan prinsip keterbukaan, bertanggungjawab dan berkelanjutan yang dapat diakses oleh keluarga miskin untuk mencukupi kebutuhan modal para anggotanya yaitu pengusaha mikro perempuan yang produktif.

Pasal 4

Tujuan dari bantuan modal LKMM adalah :

- a) Menyediakan sumber permodalan usaha mikro yang dapat diakses dengan mudah, dan murah oleh keluarga miskin di wilayah dusun / lingkungan.

- b) Mengembangkan infrastruktur ekonomi keluarga miskin yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berbentuk Lembaga Keuangan Mikro dan mewujudkan solidaritas sosial dan modal sosial masyarakat disetiap dusun / lingkungan.
- c) Meningkatkan kapabilitas para pengusaha mikro keluarga miskin yang berdomisili dalam wilayah kerja LKMM.

Pasal 5

- (1) Bantuan modal berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang distribusi dan pengendaliannya bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan distribusi dan pengendalian bantuan modal kepada LKMM, Dinas bertugas:
 - a. menyusun rencana persiapan kelompok sasaran yang akan memperoleh bantuan,
 - b. mengusulkan alokasi sasaran penerima bantuan untuk ditetapkan dalam keputusan bupati,
 - c. memfasilitasi kerjasama antar Badan/Dinas/kantor terkait dalam pemberdayaan Pengusaha Mikro Perempuan yang tergabung dalam LKMM
 - d. menerbitkan rekomendasi sebagai persyaratan pencairan keuangan di rekening Simpeda Bank Jatim untuk tujuan pengendalian keuangan sekaligus pemutakhiran data dan bimbingan teknis keuangan.
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan melaporan perkembangan penggunaan/pemanfaatan bantuan modal kepada Bupati secara periodik.
- (3) Anggaran untuk pelatihan Pengurus LKMM, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dibebankan pada pos

kegiatan pengembangan klaster bisnis yang tersedia pada Dinas yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Anggaran bantuan modal yang tersedia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan kegiatan pengembangan klaster bisnis yang tersedia pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dua kegiatan yang terpadu

Pasal 6

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang dipergunakan sebagai sumber permodalan bagi LKMM untuk dikelola secara mandiri dengan prinsip - prinsip transparansi, akuntabel dan berkelanjutan yang dapat diakses anggotanya dalam upaya peningkatan usaha mikro keluarga miskin di Kabupaten Jember.

Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah LKMM yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan LKMM pengelola modal adalah :
- a. LKMM yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
 - b. Wilayah kerja LKMM adalah Dusun / Lingkungan
 - c. Pengurus LKMM yang dipilih adalah orang - orang yang dipercaya oleh keluarga miskin melalui seleksi ketokohan, kerelawanan, memiliki cacat sosial paling sedikit, bersedia mengelola hibah modal dengan itikad baik untuk membantu keluarga miskin dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan usahanya
 - d. Seluruh pengurus dan anggota LKMM adalah perempuan
 - e. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- (3) Pembentukan LKMM diprioritaskan pada wilayah Dusun / Lingkungan yang merupakan kantong - kantong kemiskinan dan atau wilayah yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi..
- (4) Pengurus LKMM berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Koordinator, Kasir dan Juru Buku.
- (5) Tata cara, prosedur rekrutmen Pengurus LKMM, mekanisme penyelenggaraan simpan pinjam serta tugas pokok pengurus LKMM diuraikan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Anggota LKMM bermatapencaharian sebagai pengusaha mikro sektor informal diutamakan dari Keluarga Miskin yang ditata secara berkelompok dan setiap kelompok terdiri dari maksimal 5 (lima) orang yang memiliki tempat tinggal berdekatan.
- (7) Anggota LKMM mengupayakan terselenggaranya pendidikan putra putrinya dan wajib mensukseskan program Wajar (Wajib Belajar) 9 Tahun dan mendukung Penghapusan Bentuk Bentuk Terburuk Pekerja Anak (BTPA)

Pasal 8

Kepala Dinas memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memberhentikan Pengurus LKMM dengan mempertimbangkan usulan anggota LKMM

Pasal 9

Dinas Koperasi UMKM mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana persiapan pembentukan LKMM
- b. Mengusulkan alokasi penyaluran bantuan modal untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- c. Menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan bantuan modal LKMM kepada Pengurus LKMM
- d. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditanda tangani oleh Bupati dan Pihak penerima bantuan modal

- e. Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, pengawasan atas penyaluran bantuan modal yang diserahkan kepada LKMM
- f. menyampaikan pelaporan pengelolaan bantuan modal kepada Bupati secara periodik

Pasal 10

Dinas Koperasi UMKM mempunyai kewajiban :

- a. Menyelesaikan masalah masalah yang terjadi dalam pengelolaan bantuan modal
- b. Melakukan koordinasi dengan Camat, dan Kepala Desa/Lurah setempat
- c. Melaporkan penyelesaian masalah dan hasil koordinasi kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Koperasi UMKM dapat melakukan kerjasama dengan perbankan, perusahaan / Corporate dan perguruan tinggi berkaitan dengan pemberdayaan LKMM.
- (2) Setiap Bank maupun perusahaan / corporate dapat ikut membina LKMM dengan memberikan bantuan manajemen atau bantuan sarana prasarana operasional LKMM sebagai wahana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) diwilayah kerjanya.
- (3) Perguruan tinggi dapat ikut membina LKMM dengan menerjunkan mahasiswa praktek kerja lapangan sebagai wahana pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Camat dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sehubungan dengan penetapan Lokasi sasaran pengembangan LKMM diwilayahnya
- (2) Kepala Desa/Lurah dapat mengusulkan lokasi sasaran LKMM memberikan data terkait potensi diwilayahnya untuk didirikan LKMM melalui Camat setempat

Pasal 13

- (1) Untuk kelengkapan sarana dan prasarana operasional LKMM serta persiapan dan pemahaman Anggota LKMM terhadap prosedur dan Mekanisme pengelolaan LKMM dan pembentukan Kelompok Masyarakat perlu diselenggarakan Pelatihan Teknis LKMM, yang sumber pembiayaannya diambilkan dari Dana Bantuan Modal yang diterima Pengurus LKMM.
- (2) Pelayanan simpan pinjam oleh pengurus LKMM kepada para anggotanya dilakukan setiap kali dalam seminggu untuk kegiatan realisasi pinjaman dan pembayaran angsuran yang waktu penyelenggaraannya ditetapkan berdasarkan musyawarah antara pengurus dengan anggotanya.
- (3) Pengurus LKMM dalam hal ini kasir, hanya diperkenankan menyimpan uang kas paling banyak Rp. 500.000,- , selebihnya harus disimpan di rekening tabungan LKMM di Bank Jatim terdekat.
- (4) Penyetoran kelebihan sisa kas LKMM ke bank dilakukan paling lambat sehari setelah LKMM menyelesaikan perhitungan transaksi pada hari tersebut ke rekening tabungan LKMM dimaksud.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan LKMM Kepala Dinas menetapkan Petugas Pendamping LKMM dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Petugas Pendamping LKMM melakukan tugas bimbingan dan pendampingan kepada pengurus LKMM dalam hal teknis pengelolaan simpan pinjam dan administrasi pembukuan LKMM sesuai dengan perintah tugas dari Kepala Dinas.
- (3) Syarat syarat dan ketentuan Petugas Pendamping LKMM diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Petugas Pendamping LKMM secara periodik melakukan kas opname atas sisa kas LKMM yang didampinginya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM.
- (2) Pendamping LKMM dalam menjalankan tugasnya mendapatkan bimbingan, pendampingan, pengarahan dan pengawasan dari Petugas Pengarah dan Pengawas (Supervisor).
- (3) Supervisor adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab Petugas Supervisor diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Besarnya jasa simpan pinjam harus rasional, dan tidak boleh membebankan anggota tetapi juga harus dapat menjamin keberlangsungan operasional LKMM dan pengembangannya di masa mendatang

Pasal 17

Surplus Hasil Usaha (SHU) dari kegiatan simpan pinjam LKMM dipergunakan untuk cadangan pemupukan modal LKMM sebesar 30%, insentif para pengurus sebesar 30%, untuk dana sosial sebesar 10%, untuk dana pendidikan sebesar 10% dan sebesar 20 % dibagikan kepada anggota LKMM sesuai dengan prestasi dan partisipasinya

Pasal 18

LKMM diwajibkan untuk mengeluarkan dana sosial atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebagaimana dimaksud pasal 17 untuk membantu kegiatan posyandu, memberikan santunan kepada anggotanya yang sakit, memberikan sumbangan sosial keagamaan serta memberikan beasiswa untuk putera-puteri anggotanya yang berprestasi.

Pasal 19

- a. Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- b. Keputusan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Jember

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : Mei 2013

BUPATI JEMBER

MZA DJALAL